

## PERAN PENGELOLAAN PANGKALAN DATA TERHADAP AKREDITASI PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI

Pengelolaan pangkalan data pada perguruan tinggi merupakan peran sentral agar aktualisasi penyelenggaraan program studi mampu terdokumentasikan dengan baik pada Forlap Ristekdikti. Data aktualisasi program studi dalam kegiatan akademik tentunya sangat dibutuhkan guna agenda akreditasi, namun kemampuan jurusan dalam menghimpun data seringkali terbatas pada komponen tupoksi program studi lainnya. Oleh karena itu peneliti merasa perlu adanya suatu penelitian yang menguraikan menguraikan secara komprehensif tentang peran pengelolaan pangkalan data terhadap akreditasi program studi di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan langkah optimalisasi Pangkalan Data Perguruan Tinggi terhadap akreditasi Program Studi di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

Penelitian ini memiliki maksud untuk mendeskripsikan fenomena yang dialami oleh objek penelitian dalam bentuk kata dan bahasayang berkaitan dengan peran, serta langkah optimalisasiPerguruan tinggi dalam menjalankan pengelolaan pangkalan data, serta implikasinya terhadap akreditasi program studi yang ada pada perguruan tinggi tersebut. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa peranan Pangkalan Data Perguruan Tinggi terhadap Akreditasi Program Studi ialah ; pertama sebagai media transformasi informasi Aktualisasi Program Studi, mengingat bahwa kepentingan penghimpunan dan pengelolaan data penyelenggaraan program studi pada dasarnya tidak hanya dibutuhkan oleh kepentingan internal perguruan tinggi semata. Peranan kedua dari pangkalan data perguruan tinggi ialah sebagai Media Pemetaan Kondisi Standar Mutu Akreditasi Program Studi. Dimana Korelasi antara akreditasi dan Pangkalan data perguruan tinggi terdapat pada adanya keharusan bagi program studi untuk senantiasa menuat konten yang berkaitan dengan profil program studi, home base dosen, data mahasiswa yang memuat aktivitas perkuliahan, data kurikulum, serta penyelenggaraan aspek tridharma perguruan tinggi oleh dosen yang harus terekam secara baik pada Forlap Ristekdikti. Peranan ketiga ialah sebagai alat kontrol aktualisasi program studi, karena berdasarkan hasil penelitian lapangan, pengelola pangkalan data pada program studi memiliki peran penting dalam kemajuan program studi. Hal ini dikarenakan mudahnya koordinasi dengan ketua program studi guna mengisi kebutuhan data yang dirasa masih kurang untuk dilaporkan. Oleh karenanya sudah tepat bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang menjadi objek penelitian ini menentukan dan menetapkan keberadaan pengelola pangkalan data pada tiap-tiap program studi. Adapun optimalisasi peran pengelolaan pangkalan data pada perguruan tinggi dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: Pertama, melakukan manajemen pengelolaan pangkalan data dengan baik. Kedua, penerapan kebijakan pengelolaan pangkalan data yang progresif.

**Ikhwan Aulia Fatahillah, SH., MH.**  
**Dr. Dedah Jubaedah, M.Si.**



## PERAN PENGELOLAAN PANGKALAN DATA TERHADAP AKREDITASI PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI

Ikhwan Aulia Fatahillah, SH., MH., dan Dr. Dedah Jubaedah, M.Si.

PERAN PENGELOLAAN PANGKALAN DATA TERHADAP AKREDITASI PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**  
**2018/2019**

ISBN 978-623-7633-45-7 (PDF)



9 786237 633457

2019



**PERAN PENGELOLAAN PANGKALAN DATA TERHADAP  
AKREDITASI PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN  
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI**

**Penulis:**

Dr. Hj. Dedah Jubaedah, M.Si  
Ikhwan Aulia Fatahillah, SH., M.H

**ISBN: 978-623-7633-45-7**

**Penyunting:**

Muhammad Abduh

**Desain Sampul dan Tata letak:**

Opik Rozikin

**Penerbit:**

**LP2M UIN SGD Bandung**

Jl. H.A. Nasution No. 105 Bandung

Tlp. (022) 7800525, Fax. (022) 7800525

<http://lp2m.uinsgd.ac.id>

96 hlm.; 25 cm.

Cetakan pertama, Oktober 2019

Hak cipta dilindungi undang- undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara  
apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah rabbil'alamin.*

Segala puji kami panjatkan kehadirat illahi rabbi yang telah memberikan kemudahan dan kemampuan kepada kami sehingga penelitian ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Meskipun, kami tidak memungkiri bahwa dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti menemui sejumlah hambatan bukan hanya dari segi waktu, tetapi yang paling utama adalah karena keterbatasan waktu dan tempat, sehingga peneliti merasa belum mampu menjangkau secara lebih jauh terkait sumber-sumber atau literatur-literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Pada akhirnya, peneliti merasa perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, tentu ada beberapa yang perlu dilengkapi atau disempurnakan. Tetapi peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi yang membacanya.

Bandung, Oktober 2019  
Ketua Kelompok

Ttd,

## ABSTRAK

Pengelolaan pangkalan data pada perguruan tinggi merupakan peran sentral agar aktualisasi penyelenggaraan program studi mampu terdokumentasikan dengan baik pada Forlap Ristekdikti. Data aktualisasi program studi dalam kegiatan akademik tentunya sangat dibutuhkan guna agenda akreditasi, namun kemampuan jurusan dalam menghimpun data seringkali terbatas pada komponen tupoksi program studi lainnya. Oleh karena itu peneliti merasa perlu adanya suatu penelitian yang menguraikan secara komprehensif tentang peran pengelolaan pangkalan data terhadap akreditasi program studi di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan langkah optimalisasi Pangkalan Data Perguruan Tinggi terhadap akreditasi Program Studi di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

Penelitian ini memiliki maksud untuk mendeskripsikan fenomena yang dialami oleh objek penelitian dalam bentuk kata dan bahasayang berkaitan dengan peran, serta langkah optimalisasi Perguruan tinggi dalam menjalankan pengelolaan pangkalan data, serta implikasinya terhadap akreditasi program studi yang ada pada perguruan tinggi tersebut.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa peranan Pangkalan Data Perguruan Tinggi terhadap Akreditasi Program Studi ialah ; *pertama* sebagai media transformasi informasi Aktualisasi Program Studi, mengingat bahwa kepentingan penghimpunan dan pengelolaan data penyelenggaraan program studi pada dasarnya tidak hanya dibutuhkan oleh kepentingan internal perguruan tinggi semata. Peranan *kedua* dari pangkalan data perguruan tinggi ialah sebagai Media Pemetaan Kondisi Standar Mutu Akreditasi Program Studi. Dimana Korelasi antara akreditasi dan Pangkalan data perguruan tinggi terdapat pada adanya keharusan bagi program studi untuk senantiasa menuat konten yang berkaitan dengan profil program studi, home base dosen, data mahasiswa yang memuat aktivitas perkuliahan, data kurikulum, serta penyelenggaraan aspek tridharma perguruan tinggi oleh dosen yang harus terekam secara baik pada Forlap Ristekdikti. Peranan *ketiga* ialah sebagai alat kontrol aktualisasi program studi, karena berdasarkan hasil penelitian lapangan, pengelola pangkalan data pada program studi memiliki peran penting dalam kemajuan program studi. Hal ini dikarenakan mudahnya koordinasi dengan ketua program studi guna mengisi kebutuhan data yang dirasa masih kurang untuk dilaporkan. Oleh karenanya sudah tepat bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang menjadi objek penelitian ini menentukan dan menetapkan keberadaan pengelola pangkalan data pada

tiap-tiap program studi. Adapun optimalisasi peran pengelolaan pangkalan data pada perguruan tinggi dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: *Pertama*, melakukan manajemen pengelolaan pangkalan data dengan baik. *Kedua*, penerapan kebijakan pengelolaan pangkalan data yang progresif.

## **ABSTRACT**

*Database management in tertiary institutions is a central role so that the actualization of the implementation of study programs can be well documented in the Forlap Ristekdikti. The actualization of study program data in academic activities is certainly very much needed for the accreditation agenda, but the ability of the majors to collect data is often limited to the main components of the main study program. Therefore, researchers feel the need for a study that outlines comprehensively about the role of database management to the accreditation of study programs within the Islamic Religious College.*

*The main objective in this study is to determine the role and steps of optimizing the Higher Education Database for the accreditation of Study Programs in the State Islamic Religious Higher Education environment.*

*This study aims to describe the phenomena experienced by the research object in the form of words and language related to the role, as well as the optimization steps of Higher Education in carrying out database management, as well as their implications for the accreditation of existing study programs at the tertiary institution.*

*From this study the results obtained that the role of Higher Education Database on Study Program Accreditation are; first as a media for information transformation on Study Program Actualization, bearing in mind that the interests of data collection and management of the administration of study programs are basically not only needed by the internal interests of tertiary institutions. The second role of the tertiary database is as Media Mapping the Condition of Study Program Accreditation Quality Standards. Where the correlation between accreditation and higher education database is there is a necessity for study programs to always load content related to the profile of study programs, lecturer home base, student data containing lecture activities, curriculum data, and implementation of aspects of higher education by lecturers who must be well recorded on the Ristekdikti Forlap. The third role is as a tool to control the actualization of the study program, because based on the results of field research, the database manager in the study program has an important role in the progress of the study program. This is due to the ease of coordination with the head of the study program in*

*order to fill data needs that are felt to be lacking to be reported. Therefore it is appropriate for Islamic Religious Colleges to be the object of this research to determine and determine the existence of database managers in each study program. The optimization of the role of database management in tertiary institutions is carried out as follows: First , manage database management properly. Second, the application of progressive database management policies.*





## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	6
E. Rencana Pembahasan .....	10
BAB II KAJIAN TEORITIS PENELITIAN .....	12
A. Perguruan Tinggi.....	12
B. Sistem Pendidikan pada Perguruan Tinggi.....	16
C. Pengolahan Data Perguruan Tinggi.....	19
1. Konsep Pengelolaan Data .....	19
2. Pangkalan Data pada Perguruan Tinggi .....	20
3. Sistem Informasi Akademik Perguruan Tinggi .....	25
D. Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi .....	28
E. Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi.....	34
BAB III METODE PENELITIAN .....	44
A. Lokasi Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian .....	46
C. Teknik Pengumpulan Data .....	47
D. Rencana Pembahasan.....	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Hasil Penelitian.....	51
1. Hasil Penelitian Pengelolaan Pangkalan data Pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. ....	51
2. Hasil Penelitian Pengelolaan Pangkalan Data pada UIN Sultan Maulana Hasanudin, Kota Serang, Banten...	56
3. Hasil Penelitian Pengelolaan Pangkalan Data pada IAIN Purwokerto, Jawa Tengah .....	59
4. Hasil Penelitian Pengelolaan Pangkalan Data pada IAIN Pekalongan .....	63
5. Hasil Penelitian Pengelolaan Pangkalan Data pada UIN Walisongo Semarang .....	65
6. Hasil Penelitian Pengelolaan Pangkalan Data pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon.....	68
B. Pembahasan .....	69
1. Peranan Pangkalan Data Perguruan Tinggi terhadap Akreditasi Program Studi .....	69
2. Optimalisasi Peran Pangkalan Data Perguruan Tinggi....	75
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	 86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran .....	87
 DAFTAR PUSTAKA .....	 89

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pangkalan data pendidikan tinggi merupakan sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. Didalamnya memuat fakta-fakta mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan tinggi. Satuan manajemen sumber daya yang ada pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi terdiri dari kelompok program studi, lembaga penelitian dan/atau lembaga pengabdian masyarakat yang menyelenggarakan fungsi pembelajaran, penelitian dan/atau pengabdian masyarakat pada Perguruan Tinggi.<sup>1</sup>

Pangkalan data pada pendidikan tinggi bertujuan untuk:

- a. mewujudkan basis data tunggal dalam perencanaan, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pendidikan tinggi;
- b. memudahhi pertukaran Data Pendidikan Tinggi bagi semua unit kerja di lingkungan Kementerian agar tercipta konsistensi data di semua unit kerja dan mendorong peningkatan kualitas data secara sistematis;
- c. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan

---

<sup>1</sup> Bidang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti, *Permenristekdikti No 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi*, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Pddikti) Ristekdikti, hlm. 1.

sinergi kegiatan pengumpulan data yang terintegrasi dalam satu pangkalan data untuk bersama-sama digunakan oleh Kementerian dan seluruh pemangku kepentingan; d. menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi; e. menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri; f. menyediakan informasi bagi Kementerian dalam melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, serta pembinaan dan koordinasi pendidikan tinggi; g. menyediakan informasi bagi masyarakat mengenai kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan h. menyediakan data bagi peningkatan standar Perguruan Tinggi secara nasional.<sup>2</sup>

Data pokok yang terdapat pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi memuat Entitas Data Pendidikan Tinggi yang terdiri atas: a. perguruan tinggi; b. program studi; c. satuan manajemen sumberdaya; d. dosen; e. tenaga kependidikan; f. mahasiswa; g. substansi pendidikan tinggi; dan h. aktivitas tridharma perguruan tinggi.

Disamping itu, Pangkalan Data juga harus memuat Substansi pendidikan tinggi yang terdiri dari konten ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni yang diajarkan dan

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 4.



dikembangkan dalam Perguruan Tinggi. Aktivitas tridharma perguruan tinggi juga merupakan komponen penting pada Pangkalan Data guna memuat data proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Keseluruhan komponen tersebut dijadikan sebagai acuan pokok yang menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian akreditasi baik di tingkat prodi sampai dengan tingkat perguruan tinggi.

Akreditasi merupakan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridharma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi. BAN-PT adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta

menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan.<sup>3</sup>

Bagi program studi pada perguruan tinggi khususnya, data penyelenggaraan pendidikan program studi memberikan manfaat agar setiap penyelenggara senantiasa optimal dan mampu memberikan kontribusi keilmuan dan data yang konsisten. Komitmen dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi, pelayanan akademik, transformasi informasi dan kebutuhan data bagi program studi merupakan suatu hal yang mutlak untuk senantiasa diabadikan dan diperhatikan mengingat adanya kewajiban program studi untuk senantiasa menjalankan Akreditasi Program Studi tersebut.

Berdasarkan pengamatan penulis di Universitas Islam Negeri Bandung, pengelolaan pangkalan data pada perguruan tinggi membutuhkan unit yang berperan vital dalam terhimpunnya data penyelenggaraan pendidikan tinggi. Lampiran data dan angka tentunya sangat dibutuhkan bagi program studi dalam menjalankan agenda akreditasi, namun seringkali kemampuan jurusan dalam menghimpun data tersebut senantiasa terbatas pada komponen tugas pokok program studi lainnya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, *Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Depdikbud, 2012), hlm. 8.

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Didi Sumardi (Ketua Pusat Pengembangan Kajian, Informasi, dan Pangkalan Data Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung), pada tanggal 21 Agustus 2018 pukul 14.50 WIB di Fakultas Syariah dan Hukum.

Oleh karena itu penulis merasa perlu adanya suatu penelitian yang menguraikan secara komprehensif tentang peran pengelolaan Pangkalan Data pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri lainnya sebagai pembandingan. Hal tersebut bertujuan agar optimalisasi dan ketersediaan arsip data perguruan tinggi dan kepentingan akreditasi senantiasa berjalan secara optimal.

## **B. Rumusan Masalah**

Pengelolaan pangkalan data pada perguruan tinggi merupakan peran vital agar terhimpunnya data penyelenggaraan pendidikan serta lampiran fisik di PTKIN dan perguruan tinggi lainnya. Lampiran fisik dari data penyelenggaraan akademik tentunya sangat dibutuhkan bagi program studi dalam menjalankan agenda akreditasi, namun kemampuan jurusan dalam menghimpun data seringkali terbatas pada komponen tupoksi program studi lainnya. Penelitian ini ingin mengedepankan optimalisasi peran Program Studi dan pengelolaan data agar penilaian komponen standar mutu akreditasi mendapatkan kualifikasi terbaik.

Guna membatasi masalah penelitian, penulis dalam penelitian ini mengajukan perumusan masalah yang terdiri dari :

1. Bagaimana peran pengelolaan Pangkalan Data Perguruan Tinggi terhadap akreditasi Program Studi di

lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri ?

2. Bagaimana peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dalam upaya optimalisasi Pengelolaan Pangkalan Data Perguruan Tinggi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran pengelolaan Pangkalan Data Perguruan Tinggi terhadap akreditasi Program Studi di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.
2. Untuk mengetahui peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dalam upaya optimalisasi pengelolaan Pangkalan Data Perguruan Tinggi.

### **D. Kajian Penelitian Terdahulu**

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki fokus penelitian konsep pangkalan data perguruan tinggi dan akreditasi program studi, diantaranya ialah :

Akrya ilmiah yang ditulis oleh Budi Ulik Wibowo yang berjudul *Strategi Percepatan Akreditasi Program Studi Sarjana*. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa Akreditasi dipandang lebih menggambarkan kualitas daripada indeks



prestasi kumulatif (IPK) lulusan. Sebagaimana terjadi, IPK lebih banyak ditentukan secara internal; sementara itu akreditasi dilakukan oleh lembaga eksternal dengan kriteria yang komprehensif. Oleh karena itu status akreditasi program studi dipandang lebih obyektif daripada IPK yang dipandang sebagai klaim internal semata. Dengan demikian setiap program studi perlu mengupayakan status akreditasi sesuai dengan tuntutan legalitas dan akuntabilitas publik. Dengan dokumen-dokumen yang tersedia, pada dasarnya setiap program studi dapat melakukan secara mandiri penilaian dan perhitungan skor kecukupan akreditasi sebelum proses akreditasi secara resmi disampaikan kepada BAN-PT. Dengan penilaian dan perhitungan tersebut dapat ditemukenali kekuatan-kekuatan dan kelemahan atau kekurangan program studi, untuk selanjutnya dapat dikaji permasalahan pokok atau isu-isu strategis yang dihadapi oleh program studi. Dengan memperhitungkan kesempatan atau peluang dan tantangan yang ada, selanjutnya dapat dirumuskan berbagai alternatif penyelesaian permasalahan-permasalahan tersebut, dengan merancang program-program dan aktivitas-aktivitas peningkatan yang mencakup 7 (tujuh) standar akreditasi yang telah ditetapkan. Program-program atau aktivitas-aktivitas itu dapat dirancang dengan pembiayaan mandiri dari institusi, atau dapat pula dicarikan dari sumberdana eksternal, termasuk dari hibah kompetisi yang ditawarkan oleh Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tim Pengembang SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi) yang berjudul Peta Masalah dalam Akreditasi Program Studi Berdasarkan Hasil Penilaian Akreditasi menguraikan bahwa guna menghadapi akreditasi, perguruan tinggi perlu untuk : 1. mengembangkan dan melaksanakan secara konsisten SPMI 2. Lakukan perbaikan sistem pengelolaan data 3. Libatkan unit-unit terkait dalam pengisian borang akreditasi 4. Adakan diskusi untuk memperoleh pemahaman bersama tentang butir-butir kriteria 4 (sangat baik) sebelum mengisi borang 5. Lakukan simulasi penilaian sebelum borang dikirim ke BAN-PT dengan menggunakan Matrik Penilaian (Buku VI) 6. Lakukan perbaikan akhir sesuai hasil simulasi.<sup>5</sup>

Karya ilmiah ketiga yakni penelitian dari Benny Leonardo E.P. dan kawan-kawan yang berjudul Integrasi Pangkalan Data Perguruan Tinggi Dengan Teknologi Web Service. Dalam penelitian ni diungkapkan bahwa menggunakan web service sebagai sarana pelaporan data ke PDPT-DIKTI dirasa sangat membantu, karena pelaporan dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa harus menunggu pada periode tertentu dalam pengiriman data, pentingnya validasi data pada internal institusi agar data yang dikirimkan ke

---

<sup>5</sup> Tim Pengembang SPMI, *Peta Masalah dalam Akreditasi Program Studi Berdasarkan Hasil Penilaian Akreditasi*, (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016), hlm. 49.

PDPT-DIKTI lengkap sesuai dengan yang diinginkan oleh PDPT-DIKTI. PDPT-DIKTI sebagai penyedia layanan diharapkan memeriksa kembali ketersediaan layanan web service, agar dapat digunakan sebagai sarana pelaporan data dari perguruan tinggi ke PDPT-DIKTI dan PDPT-DIKTI mengkaji ulang kelengkapan dokumen, baik itu pada dokumen kamus data pendidikan maupun dokumen lain yang menjadi acuan perguruan tinggi untuk membangun sebuah sistem pelaporan data.<sup>6</sup>

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan kajian diatas ialah penelitian ini memiliki fokus masalah pada aspek pengelolaan Pangkalan Data Perguruan Tinggi serta kontribusinya terhadap akreditasi program studi di lingkungan PTKIN. Penulis memiliki hipotesis bahwa aktualisasi optimal dalam penyelenggaraan perguruan tinggi saja tidaklah cukup. Hal ini mengingat bahwa sistem pendidikan perguruan tinggi telah memasuki era digitalisasi sebagai instrumen dalam penghimpunan data aktualisasi perguruan tinggi. Sekalipun aktualisasi tinggi, namun jika tidak dibekali dengan metode penginputan data yang tidak optimal maka dapat dipastikan nilai akreditasi tidak akan maksimal.

---

<sup>6</sup> Benny Leonard Enrico Panggabean. *Integrasi Pangkalan Data Perguruan Tinggi Dengan Teknologi Web Service*, (Tesis, Pascasarjana UNHAS, Makassar. 2013), hlm. 42.

## **E. Rencana Pembahasan**

Rencana pembahasan dalam penelitian ini mencakup menjadi 4 Bab, yang pada tiap bab memiliki sub bab yang memuat penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan konsep penelitian.

Berikut merupakan rencana pembahasan dalam penelitian yang peneliti ajukan : Peran Pengelolaan Pangkalan Data Terhadap Akreditasi Program Studi Di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

### **BAB I : Pendahuluan**

1. LatarbelakangMasalah
2. Perumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Kegunaan Penelitian
5. Tinjauan Pustaka

### **BAB II : Kajian Teoritis Penelitian**

1. Pendidikan Tinggi
2. Sistem Pendidikan Tinggi
3. Pengolahan Data Perguruan Tinggi
4. Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi

### **BAB III : Metode Penelitian**

### **BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

1. Hasil Penelitian
2. Pembahasan Penelitian



- a. Peran Pengelolaan Pangkalan Data Perguruan Tinggi terhadap Akreditasi Program Studi di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.
- b. Peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Dalam Upaya Optimalisasi Pengelolaan Pangkalan Data Perguruan Tinggi.

BAB IV : Kesimpulan dan Penutup

Daftar Referensi

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS PENELITIAN**

#### **A. Perguruan Tinggi**

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang dimaksud dengan Perguruan tinggi ialah institusi yang menjalankan kegiatan lanjutan dari pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.<sup>7</sup> Dalam aturan lain, pendidikan tinggi juga diartikan sebagai pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari pada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.<sup>8</sup>

Tujuan dari diselenggarakannya pendidikan tinggi adalah :<sup>9</sup>

1. Mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.

---

<sup>7</sup> Lihat pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1989 tentang Standar Pendidikan Nasional.

<sup>8</sup> Lihat pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.

<sup>9</sup> Lihat pasal 16 ayat (1) dan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1989 tentang Standar Pendidikan Nasional.

2. Mengembangkan dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta mengoptimalkan penggunaannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Perguruan tinggi merupakan sebuah institusi yang sangat memiliki peran yang luas atau makro dalam pengembangan kualitas sumber daya yang berkualitas jauh diatas rata-rata.

Keberadaan sumber daya manusia sendiri sangat penting keberadaannya karena manusialah yang dianggap paling memiliki bakat, kreatifitas, karya, dorongan, dan tentu saja peran yang nyata.<sup>10</sup> Dalam perguruan tinggi juga berlaku seperti itu tanpa adanya manusia perguruan tinggi tidak mungkin dapat bergerak menuju sesuatu apa yang diinginkannya.

Peran pengembangan kualitas sumber daya manusia tentunya tidak terlepas dari aspek pendidikan. Pendidikan sendiri dilihat dari pengertiannya merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sebuah proses belajar mengajar agar peserta didik menjadi aktif dan berkembang dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

---

<sup>10</sup> Taliziduhu Ndraha, Pengantar Teori Pengembangan sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999).

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.<sup>11</sup>

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Dalam hal ini perlu diketahui kembali bahwa perguruan tinggi telah dibedakan menurut pengelolannya yaitu:

1. Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang pengelolaan dan regulasinya dilakukan oleh Negara.
2. Perguruan tinggi swasta, adalah perguruan tinggi yang pengelolaan dan regulasinya dilakukan oleh swasta.

Selanjutnya Perguruan Tinggi merupakan pendekatan Mikro dan Makro, pendekatan mikro yaitu tinjauan terhadap proses belajar mengajar yang terjadi didalam lembaga, sedangkan pendekatan makro tinjauan terhadap proses belajar mengajar yang berlangsung antara lembaga dengan lingkungannya. Sedangkan Perguruan Tinggi sebagai komunitas ilmiah, yakni Perguruan Tinggi adalah komunitas ilmiah atau komunitas pelajar. Jadi perguruan tinggi sebagai komunitas dapat berfungsi mentranspormasi dan melestarikan system nilai, tata cara dan pengetahuan. Perguruan tinggi juga

---

<sup>11</sup> Abdul Malik Fajar, *Holistika Pemikiran Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo. Persada, 2005), hlm. 253.

didukung dan diberi tugas menyelenggarakan program tetap yang disebut kurikulum.<sup>12</sup>

Dari penjelasan diatas maka perguruan tinggi merupakan gejala kota, yang identik dengan kemodernan dan lebih menekankan pendekatan yang bersifat liberal. Peranan perguruan tinggi dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas dipandang potensial dan sangat menentukan. Masalah yang perlu dicermati adalah sudah sejauh mana perguruan tinggi mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, mandiri, dan professional pada bidang yang ditekuni. membicarakan lulusan yang mandiri dan professional adalah menjadi tanggung jawab perguruan tinggi dalam hal bagaimana mengolah dan memanfaatkan program dan kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan kemahasiswaan secara optimal. Antara lain adalah mengolah dan memanfaatkan tenaga pembimbing kemahasiswaan, waktu, diluar kegiatan akademik, menyusun program dan kegiatan berkualitas, menyusun pembiayaan yang memadai dan sarana prasarana. Apabila hal tersebut di atas dikelola secara professional akan mampu menciptakan sumber daya manusia berkualitas dan dengan sendirinya akan meluluskan lulusan yang mandiri dan professional. Keberhasilan suatu perguruan tinggi dapat

---

<sup>12</sup>Taliziduhu Ndraha, *Pengantar Teori Pengembangan sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 22.

diukur atau lebih ditentukan oleh kemampuan menciptakan mahasiswa sebagai pencari kerja.<sup>13</sup>

## **B. Sistem Pendidikan pada Perguruan Tinggi**

Sedangkan sistem pendidikan tinggi merupakan bagian dari Sisdiknas merupakan sistem yang mengatur proses penyelenggaraan pendidikan tinggi, untuk mewujudkan tujuan pendidikan tinggi. Dalam sistem pendidikan tinggi dirancang institusi pengelola pendidikan tinggi serta unsur-unsurnya yang mencakup ketentuan mengenai kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan, tanggung-jawab, dan mekanisme koordinasi.<sup>14</sup>

Perancangan proses pendidikan tinggi dilakukan sesuai fungsi, untuk mewujudkan tujuan pendidikan tinggi dengan efektif sesuai dengan sistem nilai (dasar, azas) dan prinsip/konsep penyelenggaraan pendidikan tinggi.<sup>15</sup>

Adapun yang menjadi asas dalam Asas Pendidikan Tinggi ialah :

- a. Kebenaran Ilmiah
- b. Penalaran
- c. Kejujuran
- d. Keadilan

---

<sup>13</sup> Abdul Malik Fajar, *Holistika Pemikiran Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo. Persada, 2005), hlm. 258.

<sup>14</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, *Buku Kurikulum Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Depdikbud, 2014), hlm. 2.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 3.

- e. Manfaat
- f. Kebajikan
- g. Tanggungjawab
- h. Kebhinekaan; dan
- i. Keterjangkauan

Fungsi pendidikan tinggi berdasarkan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ialah untuk

- a. mengembangkan kemampuan; membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat; mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. mengembangkan sivitas akademika; inovatif, responsif, kreatif, terampil, toleran, kontributif; berdaya-saing, kooperatif, melalui tridarma;
- c. mengembangkan iptek dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Tinggi menurut Undang undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:

- a. Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi; regulator, fasilitator, pengawas.
- b. Memberikan otonomi kepada perguruan tinggi;
- c. Meningkatkan secara luas partisipasi masyarakat;
- d. Nirlaba.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, *Buku KurikulumPerguruan Tinggi*, (Jakarta: Depdikbud, 2014), hlm. 7.

Jasa pendidikan merupakan bentuk jasa yang melibatkan tingkat interaksi yang tinggi antara penyedia jasa pendidikan (lembaga pendidikan) dan pengguna jasa pendidikan, dimensi jasa pendidikan jasa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. *Tangible*( bukti fisik), yaitu meliputi fasilitas fisik,perlengkapan, karyawan/staf pengajar dan sarana komunikasi. Misalnya fasilitas pembelajaran (gedung), fasilitas laboratorium,fasilitas perpustakaan,media pembelajaran, kantin, tempat parkir, sarana ibadah, fasilitas olah raga, serta busana penampilan staf administrasi maupun staf pengajar.
- b. *Reability* (keandalan), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera atau cepat,akurat dan memuaskan. Misalnya mata pelajaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan,jadwal pembelajarakan, proses pembelajaran yang akurat ,penilaian yang objektif,bimbingan dan penyuluhan ,serta aktivitas lain yang semuanya untuk memperlancar proses pembelajaran peserta didik.
- c. *Responsiveness* (daya tanggap), yaitu mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, respek terhadap peserta didik, serta memiliki sifat dapat dipercaya, bebas dari bahaya dan keraguan.Misalnya seluruh staf administrasi, staf



pengajar maupun pejabat structural harus benar-benar kompeten dibidangnya sehingga reputasi bidang lembaga pendidikan positif dimata masyarakat.

- d. *Empathy* (empati), yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi dengan baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan peserta didiknya. Misalnya staf pengajar mengenal siswanya yang mengikuti proses pembelajaran, guru bisa benar-benar berperan sesuai dengan fungsinya, perhatian yang tulus diberikan kepada para mahasiswa/I nyaberupa kemudahan mendapatkan pelayanan, keramahan, komunikasi serta kemampuan memahami kebutuhan mahasiswa nya.

## **C. Pengolahan Data Perguruan Tinggi**

### **1. Konsep Pengelolaan Data**

Data adalah bukti dari suatu peristiwa yang dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat. Secara teknis, data lebih berkaitan dengan pengumpulannya secara empiris. Dengan demikian, data merupakan satuan terkecil yang diwujudkan dalam bentuk simbol angka, simbol huruf, atau simbol gambar yang menggambarkan nilai suatu variabel tertentu sesuai dengan kondisi data di lapangan. Simbol angka, huruf atau gambar sering disebut dengan data mentah atau besaran yang belum menunjukkan suatu ukuran terhadap suatu konsep

atau gejala tertentu. Besaran data tersebut belum memiliki arti apa pun jika belum dilakukan pengolahan atau analisis lebih lanjut dalam bentuk informasi atau indikator pendidikan.<sup>17</sup>

Pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pendidikan baik di pendidikan formal maupun nonformal sangat dipengaruhi oleh tersedianya data yang lengkap, sah (*valid*), dapat dipercaya (*reliable*), relevan dan tepat waktu. Dalam rangka mencapai perencanaan dan pelaksanaan program yang baik maka semua unit kerja yang menangani perencanaan pendidikan memerlukan data yang memadai.<sup>18</sup>

Data memiliki manfaat yang besar dalam menentukan program pembangunan pendidikan. Manfaat data secara garis besar dapat dikelompokkan dalam empat kategori, yakni a) dasar penyusunan rencana dan program, b) alat kontrol atau monitor pelaksanaan program, c) dasar penilaian atau evaluasi, dan d) pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan.<sup>19</sup>

## **2. Pangkalan Data pada Perguruan Tinggi**

Pangkalan data pendidikan tinggi merupakan kumpulan data dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang

---

<sup>17</sup> Nur Aedi, *Pengolahan dan Analisis Data Hasil Penelitian*. (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 29

<sup>18</sup> Ibid, hlm 22.

<sup>19</sup> Ibid, hlm 32.

dilaksanakan oleh seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.<sup>20</sup>

Fungsi dari diselenggarakannya pangkalan data pada perguruan tinggi ialah sebagai sumber informasi bagi lembaga akreditasi dalam melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Disamping itu, pangkalan data juga merupakan sumber informasi pemerintah untuk melakukan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi.

Pangkalan data pada perguruan tinggi juga dapat dijadikan sebagai langkah transformasi informasi kepada masyarakat untuk mengetahui kinerja program studi dan perguruan tinggi, agar dikemudian hari masyarakat dapat mengambil keputusan secara efektif dalam menentukan pilihan menempuh jenjang perguruan tinggi.

Dalam operasionalisasinya, pangkalan data pendidikan tinggi dikembangkan serta dikelola oleh kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh kementerian. Umumnya pada setiap institusi perguruan tinggi memiliki unit tersendiri yang konsentrasi kerjanya mengacu pada aspek pengelolaan pangkalan data.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Tim Pengembang SPMI, *Peta Masalah dalam Akreditasi Program Studi Berdasarkan Hasil Penilaian Akreditasi*, (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016), hlm. 52.

<sup>21</sup> Lihat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Pangkalan data Pendidikan Tinggi merupakan lembaga yang menyediakan pusat penyimpanan data pelaporan akademik dan juga non akademik dalam suatu perguruan tinggi.<sup>22</sup> Pangkalan data juga memiliki peran dalam mendukung *benchmarking* perguruan tinggi.

Keberadaan pangkalan data dalam perguruan tinggi juga dapat membantu pemangku kebijakan dalam perguruan tinggi dalam menetapkan dasar-dasar kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perguruan tinggi.

Kegiatan yang diselenggarakan dalam pangkalan data perguruan tinggi haruslah memuat informasi yang berkaitan dengan Satuan pendidikan, administrasi, layanan publik, manajemen user, tenaga kependidikan, dosen, dan juga sumber daya yang ada pada perguruan tinggi. Hal demikian juga dapat diartikan sebagai *Forlap Domain*.<sup>23</sup>

Satuan pendidikan memuat mengenai informasi jenis institusi dan instrumen penyelenggaraan satuan atau unit dalam perguruan tinggi. Didalamnya harus memuat gambaran mengenai komprehensif mengenai Institusi Perguruan tinggi dan program studi dalam hal pendirian, akreditasi, data kompetensi, serta gambaran perkembangan satuan/unit dalam rentang waktu tertentu.

Pangkalan data juga harus memuat mengenai instrumen penyelenggaraan akademik dalam perguruan tinggi yang

---

<sup>22</sup> Lihat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

<sup>23</sup> Ibid.

memuat data administrasi mahasiswa dan juga dosen. Disamping itu pangkalan data juga harus mampu menjalankan tugas pelayanan akademik agar transformasi informasi antara user dan juga pangkalan data memiliki keselarasan. User atau pengguna umumnya berasal dari civitas akademik dalam perguruan tinggi. Dosen dan mahasiswa senantiasa dituntut untuk mencatatkan histori akademik yang dijalankan dengan akun yang telah dimiliki agar progres aktivitas akademik senantiasa dapat terkontrol.

Alur dalam penyelenggaraan pangkalan data pada perguruan tinggi, pada umumnya dijalankan dengan uraian sebagai berikut :<sup>24</sup>

1. Sistem aplikasi online report (Forlap).

Data-data pada sistem aplikasi online report (Forlap) secara keseluruhan dikelola oleh DIKTI. Data yang terdapat pada aplikasi Forlap ini adalah data Dosen, data Mahasiswa, data Perkuliahan. Untuk data dosen hanya dikelola oleh DIKTI saja. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada data dosen yang sama dan tidak ada data Dosen yang menjadi dosen tetap di lebih dari satu Perguruan Tinggi. Sistem forlap ini dapat diakses oleh semua Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia.

2. Sistem aplikasi feeder.

---

<sup>24</sup> Buku Petunjuk. *Aplikasi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, hlm, 3.

Aplikasi feeder ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola data Mahasiswa dan data Perkuliahan masing-masing Perguruan Tinggi. Di mana aplikasi ini dikelola sendiri oleh masing-masing perguruan tinggi yang kemudian dapat ditampilkan juga pada aplikasi Forlap.

### 3. Web service.

Pada web service hubungan antara klien dan server tidak terjadi secara langsung. Hubungan antarklien dan server dijumpai oleh file web service dalam format tertentu. Sehingga akses terhadap database akan ditangani tidak secara langsung oleh server, melainkan melalui perantara yang disebut sebagai web service. Peran dari web service ini akan mempermudah distribusi sekaligus integrasi database yang tersebar di beberapa server sekaligus.

### 4. Aplikasi Sinkronisasi.

Aplikasi ini digunakan saat dilakukan proses sinkronisasi data antara data yang ada pada aplikasi Feeder dengan yang ada di aplikasi Forlap DIKTI. Misalkan saat proses sinkronisasi ini data dosen yang ada di Aplikasi Feeder disinkronisasikan dengan data dosen yang ada di DIKTI. Sehingga data dosen yang ada di Aplikasi Feeder akan sama dengan data dosen yang dimiliki DIKTI.

5. Kopertis dan Dinas bisa mengakses aplikasi Forlap dan mengakses datanya, namun sifatnya hanya dapat memonitor data tersebut serta dapat memberikan komentar jika terdapat data mahasiswa atau data perkuliahan yang kurang sesuai dan harus dicek ulang ulang DIKTI.

### **3. Sistem Informasi Akademik Perguruan Tinggi**

Dewasa ini penggunaan kata sistem semakin meluas dan meliputi berbagai bidang, sehingga timbul berbagai definisi dan istilah tentang sistem tersebut yang masing-masing beranjak dari sudut pandang dan lingkup pengertian itu sendiri. Pada dasarnya kata sistem berasal dari bahasa Yunani *Sytema* yang berarti kesatuan, yakni keseluruhan dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan satu sama lain. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.<sup>25</sup>

Seringkali terdapat penggunaan istilah data dan informasi secara bersamaan dengan maksud yang sama, padahal data dan informasi merupakan dua hal yang berbeda. Walaupun demikian keduanya berkaitan erat dengan fakta. Data adalah bahan informasi, dirumuskan sebagai kumpulan

---

<sup>25</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, *Buku Kurikulum Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Depdikbud, 2014), hlm. 4.

dari simbol-simbol yang teratur yang menyatakan jumlah, tindakan-tindakan, hal-hal dan sebagainya. Data dibentuk dari lambang grafis, alfabetis, numeric, atau lambang khusus. Sedangkan Informasi adalah data yang telah diolah ke dalam bentuk yang berarti bagi si pemakai, mempunyai nilai guna atau manfaat dalam proses pengambilan keputusan pemakainya.<sup>26</sup>

Hubungan data dan informasi didefinisikan sebagai bahan baku dan produk jadi. Data sebagai bahan baku, diolah melalui suatu proses transformasi atau pengolahan data menjadi informasi. Atau dapat dikatakan bahwa informasi merupakan keluaran-keluaran (*output*) dari proses transformasi, dimana data berfungsi sebagai masukan-masukannya (*input*). Jika ditinjau sebagai suatu sistem, maka sistem informasi akan menerima masukan-masukan yang berupa data dan instruksi, mengolah data sesuai dengan instruksi-instruksi, dan mengeluarkan hasilnya berupa informasi-informasi.<sup>27</sup>

Fungsi pengolah data menjadi informasi seringkali memerlukan data yang telah dikumpulkan dan diolah sebelumnya. Oleh karena itu pada model sistem informasi perlu ditambahkan alat penyimpanan sehingga kegiatan

---

<sup>26</sup> Budi Oetomo Dharma Sutedjo, *Perancangan dan Pembangunan Sistem Informasi*. (Yogyakarta, Penerbit Andi: 2002), hlm. 23.

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 25-26.



pengolahan mempunyai data, baik yang baru maupun yang telah disimpan sebelumnya.<sup>28</sup>

Dalam pengertian lain, diungkapkan pula bahwa Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian pengertian dari kedua kata yang membentuknya, maka dapat dijelaskan Sistem Informasi adalah sebuah sistem manusia/mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, prosedur pedoman, model manajemen dan keputusan, dan sebuah basis data.<sup>30</sup>

Sistem Informasi akademik merupakan tiang utama dalam mengatur segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan, didalam sistem inilah komponen-komponen yang ada dapat saling berinteraksi. Sebuah sistem informasi akademik yang baik tentunya mampu menjalankan semua hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan maupun

---

<sup>28</sup> Buku Petunjuk. *Aplikasi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, hlm, 4.

<sup>29</sup> Ibid, hlm, 5,

<sup>30</sup> Budi Oetomo Dharma Sutedjo, *Perancangan dan Pembangunan Sistem Informasi*. (Yogyakarta, Penerbit Andi: 2002), hlm. 23.

hal-hal spesifik lainnya, semua komponen dipermudah dengan adanya sistem ini, tidak perlu terjadi kesalahpahaman jika aturan-aturannya sudah masuk kedalam sistem.<sup>31</sup>

#### **D. Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi**

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom

---

<sup>31</sup> Buku Petunjuk. *Aplikasi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, hlm, 3.

untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Menurut Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Dikti (2014), Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 53 UU Dikti, SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME atau akreditasi. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI antara lain sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjwai pendirian perguruan tinggi itu, jumlah program studi dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana perguruan tinggi tersebut tanpa campur tangan pihak lain.<sup>32</sup>

Sebagai contoh, SPMI di universitas tidak cocok diimplementasikan di sekolah tinggi. Demikian pula, SPMI di perguruan tinggi kelas dunia tidak cocok digunakan di perguruan tinggi dengan visi lokal. Sekalipun setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI setiap perguruan tinggi. Di dalam Pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan

---

<sup>32</sup> Tim Pengembang SPMI, *Peta Masalah dalam Akreditasi Program Studi Berdasarkan Hasil Penilaian Akreditasi*, (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016), hlm. 51

melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan hal terpenting dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Sesuai dengan istilah internal di dalam SPMI, kelima langkah tersebut harus dilaksanakan secara internal oleh perguruan tinggi. Sebagai contoh, langkah evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Dikti dalam SPMI di suatu perguruan tinggi tidak dapat dilakukan oleh lembaga lain di luar perguruan tinggi tersebut sekalipun lembaga tersebut dipandang kredibel. Pihak eksternal dapat dilibatkan bukan dalam SPMI melainkan dalam SPME, yaitu melalui proses akreditasi.

Lima langkah utama di dalam SPMI suatu perguruan tinggi berkaitan erat dengan standar di dalam SPMI. Menurut Pasal 54 UU Dikti, standar yang harus digunakan di dalam SPMI setiap perguruan tinggi adalah SN Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbud dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada SN Dikti. SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada

Masyarakat.<sup>33</sup> Sementara itu, Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan bidang nonakademik yang melampaui SN Dikti. Pembahasan mengenai Standar Dikti secara rinci, antara lain mengenai tata cara perumusan standar. Sebagaimana diuraikan di atas, SPM Dikti yang terdiri atas SPMI dan SPME harus didasarkan PD Dikti. Hal ini berarti bahwa data dan informasi yang digunakan untuk SPMI harus identik dengan data dan informasi yang digunakan untuk SPME. Sebagai contoh, apabila dari kegiatan evaluasi di dalam SPM, SPMI, dan SPME atau Akreditasi bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME). Seberapa jauh perguruan tinggi melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi tersebut merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu untuk pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi tersebut, dan pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) perguruan tinggi tersebut.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, *Buku KurikulumPerguruan Tinggi*, (Jakarta: Depdikbud, 2014), hlm. 14.

<sup>34</sup> Tim Pengembang SPMI, *Peta Masalah dalam Akreditasi Program Studi Berdasarkan Hasil Penilaian Akreditasi*, (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016), hlm. 55.

Dalam bagian ini akan diuraikan langkah tentang bagaimana perguruan tinggi mengimplementasikan SPMI pada semua arah dan semua kegiatan dari penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Hal ini berarti pengelolaan perguruan tinggi yang bersangkutan merupakan pengelolaan yang berorientasi dan berbasis pada penjaminan mutu. Jika pengelolaan perguruan tinggi sebelumnya mengabaikan peran penjaminan mutu maka dengan menerapkan SPMI di dalam pengelolaan perguruan tinggi para pengelola perguruan tinggi harus secara konsisten mengupayakan pencapaian mutu dalam semua aspek, yaitu aspek input, process, output, dan outcomes dari perguruan tinggi tersebut. Inti SPMI adalah keberadaan Standar Dikti yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.<sup>35</sup>

Dengan demikian, pelaksanaan SPMI pada perguruan tinggi akan menyebabkan perguruan tinggi harus bekerja berdasarkan Standar Dikti yang telah ditetapkan. Semua Standar Dikti ini harus diupayakan pemenuhannya oleh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Pelaksanaan Standar Dikti kemudian diikuti dengan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti yang pada gilirannya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan pengendalian untuk kemudian

---

<sup>35</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, *Buku KurikulumPerguruan Tinggi*, (Jakarta: Depdikbud, 2014), hlm. 7

diakhiri dengan kegiatan peningkatan Standar Dikti (atau disebut *kaizen*).

Tahap di atas secara berurutan membentuk suatu siklus SPMI yang selalu bergerak dinamis dan berkesinambungan dengan arah ke atas, yakni ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan. Siklus pelaksanaan SPMI yang dimulai dari tahap pertama, yaitu penetapan Standar Dikti hingga tahap kelima, yaitu peningkatan Standar Dikti inilah yang menjadi pokok bahasan dalam bagian ini. Kelima tahap ini selalu diterapkan untuk semua Standar Dikti dalam SPMI, namun durasi atau kecepatan atau ‘usia’ siklus tidaklah sama untuk setiap Standar Dikti. Contoh, siklus SPMI untuk Standar Dikti tentang sarana prasarana, antara lain standar kebersihan ruang kelas, tidak akan sama durasinya dengan siklus untuk standar kurikulum. Artinya, pada standar kebersihan ruang kelas, durasi siklus mulai dari tahap pertama, yaitu penetapan standar hingga tahap terakhir, yaitu *kaizen* dapat berlangsung dalam hitungan minggu. Sementara itu, pada standar kurikulum durasi siklus SPMI tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu seminggu atau bahkan sebulan, tetapi paling cepat semesteran atau bahkan lima tahunan. Hal ini disebabkan tidak mungkin pelaksanaan standar kurikulum harus dievaluasi dan dikoreksi setiap minggu atau bulan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Tim Pengembang SPMI, *Peta Masalah dalam Akreditasi Program Studi Berdasarkan Hasil Penilaian Akreditasi*, (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016), hlm. 61.

Demikian pula jika standar kurikulum akan dikaji ulang untuk ditingkatkan, hal ini tidak mungkin dilakukan setiap semester atau tahun. Sebaliknya, evaluasi dan tindakan koreksi terhadap pelaksanaan standar kebersihan gedung tentu tidak mungkin harus menunggu mingguan atau bulanan

#### **E. Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi**

Akreditasi merupakan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.<sup>37</sup> BAN-PT adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta

---

<sup>37</sup> Buku Kajian, *Analisis Sistem Akreditasi Program Studi*, (Kementerian Pendidikan Nasional, 2011), hlm. 10.



menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan.<sup>38</sup>

Setidaknya terdapat 7 standar mutu yang menjadi acuan bagi program studi dalam menjalankan proses akreditasi, standar tersebut ialah :<sup>39</sup>

- a. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaiannya
- b. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu
- c. Mahasiswa dan lulusan
- d. Sumber daya manusia
- e. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
- f. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- g. Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama

Standar Visi, Misi, tujuan dan strategi pencapaian adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program studi untuk meraih masa depan. Strategi dan upaya pewujudannya, difahami dan didukung dengan penuh komitmen serta partisipasi yang baik oleh seluruh pemangku

---

<sup>38</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, *Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Depdikbud, 2012), hlm. 8.

<sup>39</sup> Tim Pengembang SPMI, *Peta Masalah dalam Akreditasi Program Studi Berdasarkan Hasil Penilaian Akreditasi*, (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016), hlm. 49.

kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah difahami, dijabarkan secara logis, sekuen dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur fikir (logika) yang secara akademik wajar. Strategi yang dirumuskan didasari analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sah dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan.<sup>40</sup>

Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah difahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan hiasan (*platitude*). Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan pewujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program studi dan perguruan tinggi yang bersangkutan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Buku Kajian, *Analisis Sistem Akreditasi Program Studi*, (Kementerian Pendidikan Nasional, 2011), hlm. 4-5.

<sup>41</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, *Buku KurikulumPerguruan Tinggi*, (Jakarta: Depdikbud, 2014), hlm. 9.

Standar kedua ialah standar Tata Pamong, Kepemimpinan, sistem Pengolahan, dan Penjamin Mutu.<sup>42</sup>

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu program studi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi sebagai kunci penting bagi keberhasilan program dalam menjalankan misi pokoknya: pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Tata pamong program studi harus mencerminkan pelaksanaan *good university governance* dan mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi, dan aspirasi pemangku kepentingan program studi.<sup>43</sup> Kepemimpinan program studi harus secara efektif memberi arah, motivasi dan inspirasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang dikembangkan. Sistem pengelolaan harus secara efektif dan efisien melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, dan pengawasan. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan continuous quality improvement pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system*) dalam rangka pemuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

---

<sup>42</sup> Buku Kajian, *Analisis Sistem Akreditasi Program Studi*, (Kementerian Pendidikan Nasional, 2011), hlm. 12-13.

<sup>43</sup> Tim Pengembang SPMI, *Peta Masalah dalam Akreditasi Program Studi Berdasarkan Hasil Penilaian Akreditasi*, (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016), hlm. 49.

Standar Mahasiswa dan lulusan, adalah Standar yang menilai keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan. Program studi harus memberikan jaminan mutu, kelayakan kebijakan serta implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa maupun pengelolaan lulusan sebagai satu kesatuan mutu yang terintegrasi. Program studi harus menempatkan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan akademik untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan oleh program studi.<sup>44</sup>

Program studi harus berpartisipasi secara aktif dalam sistem perekrutan dan seleksi calon mahasiswa agar mampu menghasilkan input mahasiswa dan lulusan bermutu. Program studi harus mengupayakan akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat. Program studi harus mengelola lulusan sebagai produk dan mitra perbaikan berkelanjutan program studi. Program studi harus berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan dan pendayagunaan alumni.<sup>45</sup>

Standar keempat ialah standar sumber daya manusia. pada standar sumber daya manusia fokus pembahasannya mengacu pada keunggulan mutu sumberdaya manusia yang

---

<sup>44</sup>Buku Kajian, *Analisis Sistem Akreditasi Program Studi*, (Kementerian Pendidikan Nasional, 2011), hlm. 12-13.

<sup>45</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, *Buku KurikulumPerguruan Tinggi*, (Jakarta: Depdikbud, 2014), hlm. 7.

andal dan mampu menjamin mutu penyelenggaraan program studi, melalui program akademik sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Program studi harus mendayagunakan sumberdaya manusia yang meliputi dosen dan tenaga kependidikan yang layak, kompeten, relevan dan andal. Dosen merupakan sumberdaya manusia utama dalam proses pembentukan nilai tambah yang bermutu pada diri mahasiswa yang dibimbingnya, bagi bidang ilmu yang diampunya, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin mutu dosen dan tenaga kependidikan yang bermutu baik, program studi harus memiliki kewenangan dan pengambilan keputusan dalam seleksi, penempatan, pengembangan karir yang baik. Program studi harus memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk menjamin mutu pengelolaan program akademik.<sup>46</sup>

Standar kelima yakni Standar Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik. Standar ini mengacu pada keunggulan mutu kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik di tingkat program studi. Kurikulum yang dirancang dan diterapkan harus mampu menjamin tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi. Kurikulum harus mampu menyediakan tawaran dan pilihan kompetensi dan pengembangan bagi pebelajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Proses pembelajaran yang

---

<sup>46</sup> Ibid, 32.

diselenggarakan harus menjamin pebelajar untuk memiliki kompetensi yang tertuang dalam kurikulum. Suasana akademik di program studi harus menunjang pebelajar dalam meraih kompetensi yang diharapkan. Dalam pengembangan kurikulum program, proses pembelajaran, dan suasana akademik, program studi harus kritis dan tanggap terhadap perkembangan kebijakan, peraturan perundangan yang berlaku, sosial, ekonomi, dan budaya.

Standar keenam ialah Standar pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi. Standar pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi adalah acuan keunggulan mutu pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi yang mampu menjamin mutu penyelenggaraan program akademik. Sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi harus menjamin kelayakan, keberlangsungan, dan keberlanjutan program akademik di program studi. Agar proses penyelenggaraan akademik yang dikelola oleh program studi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, program studi harus memiliki akses yang memadai, baik dari aspek kelayakan, mutu maupun kesinambungan terhadap pendanaan, prasarana dan sarana, serta sistem informasi. Standar pendanaan, prasarana dan sarana serta sistem informasi merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi yang merefleksikan kapasitas program studi didalam memperoleh, merencanakan, mengelola, dan

meningkatkan mutu perolehan sumber dana, prasarana dan sarana serta sistem informasi yang diperlukan guna mendukung kegiatan tridharma program studi.<sup>47</sup>

Tingkat kelayakan dan kecukupan akan ketersediaan dana, prasarana dan sarana serta sistem informasi yang dapat diakses oleh program studi sekurang-kurangnya harus memenuhi standar kelayakan minimal. Program studi harus terlibat dalam pengelolaan, pemanfaatan dan kesinambungan ketersediaan sumberdaya yang menjadi landasan dalam menetapkan standar pembiayaan, prasarana dan sarana serta sistem informasi. Program studi harus berpartisipasi aktif dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan untuk mencapai target kinerja yang direncanakan (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Program studi harus memiliki akses yang memadai untuk menggunakan sumber daya guna mendukung kegiatan tridharma program studi.<sup>48</sup>

Standar penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pelayanan dan/atau pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program studi.

---

<sup>47</sup> Buku Kajian, *Analisis Sistem Akreditasi Program Studi*, (Kementerian Pendidikan Nasional, 2011), hlm. 17.

<sup>48</sup> M. Fawaz Hilmy, dkk, *Sistem Akreditasi Prodi Dan Sistem Akreditasi Institusi*, diakses dari website <https://www.academia.edu/> pada tanggal 23 Agustus 2018, pukul 21.30. WIB, hlm. 9.

Kelayakan penjaminan mutu ini sangat dipengaruhi oleh mutu pengelolaan dan pelaksanaannya. Sistem pengelolaan pendidikan, penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama harus terintegrasi dengan penjaminan mutu program studi untuk mendukung terwujudnya visi, terselenggaranya misi, tercapainya tujuan, dan keberhasilan strategi perguruan tinggi yang bersangkutan.

Agar mutu penyelenggaraan akademik yang dikelola oleh program studi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, program studi harus memiliki akses yang luas terhadap penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama, internal maupun eksternal.

Standar ini merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi program studi yang merefleksikan kapasitas dan kemampuan dalam memperoleh, merencanakan (kegiatan dan anggaran), mengelola, dan meningkatkan mutu penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. Program studi harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan, pemanfaatan dan kesinambungan penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama pada tingkat perguruan tinggi. Program studi memiliki akses dan mendayagunakan sumberdaya guna



mendukung kegiatan penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Ibid, hlm. 12.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada beberapa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang ada di Wilayah Pulau Jawa. Pada pulau Jawa, terdapat beberapa perguruan tinggi keagamaan Islam yang dirasa memiliki perkembangan yang pesat dalam mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi serta pengelolaan pangkalan data yang baik dan komprehensif. Diantaranya ialah di UIN Syarif Hidayatullah yang berada di Wilayah DKI Jakarta, UIN Sultan Maulana Hasanudin di Provinsi Banten, IAIN Syekh Nurjati Cirebon di Jawa Barat, UIN Walisongo Semarang, IAIN Purwokerto, dan IAIN Pekalongan di Jawa Tengah.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan tehnik atau cara tertentu yang dilakukan sebagai dasar acuan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Bogdan dan Tylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rosda Karya, 2010), hlm. 4.

Metode kualitatif deskriptif menyesuaikan pendapat antara peneliti dengan informan. Pemilihan metode ini dilakukan karena analisisnya tidak bisa dalam bentuk angka dan peneliti lebih mendeskripsikan segala fenomena yang ada dimasyarakat secara jelas.<sup>51</sup>

Penelitian ini memiliki maksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, dalam hal ini berkaitan dengan peran, serta langkah strategis yang dilakukan Perguruan tinggi dalam menjalankan pengelolaan pangkalan data, serta implikasinya terhadap akreditasi program studi yang ada pada perguruan tinggi tersebut. Penelitian ini akan mendeskripsikan hal tersebut dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian ini juga memuat fakta yang terjadi di lapangan serta gambaran mengenai peran pengelolaan pangkalan data dan implikasi terhadap akreditasi program studi yang sesuai dengan hasil temuan di lapangan, agar kemudian dapat dikaji secara mendalam dengan pendekatan-pendekatan teoritis.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data penelitian adalah sumber yang memuat darimana informasi dan data diperoleh.<sup>52</sup> Data merupakan hasil pencatatan yang berbentuk angka dan fakta peristiwa

---

<sup>51</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah Dasar*, Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 129.

<sup>52</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rosda Karya, 2010), hlm. 13.

yang dapat dijadikan bahan dalam menyusun sebuah informasi. Data yang terhimpun selanjutnya disimpulkan sebagai sebuah narasi yang yang mudah dibaca dan dipahami. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber data, baik yang bersifat primer maupun sekunder.

#### **a) Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data dengan pendekatan penyelidikan maupun wawancara secara langsung terhadap subjek penelitian guna terpenuhinya tujuan-tujuan tertentu dalam penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh dari Lembaga Penjamin Mutu dan juga operator utama Pangkalan data pada perguruan tinggi, atau informan-informan lainnya yang berkaitan dengan kondisi lapangan.

Guna memudahkan penulis dalam melakukan pencarian data-data tersebut maka prosedur yang akan dilakukan dalam penelitian ini ialah :

##### **a. Wawancara**

Wawancara ialah suatu proses untuk mendapatkan keterangan, informasi dan data yang sejalan dengan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab yang dibantu dengan alat bantu interview guide (panduan wawancara).<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 174.

Husaimi Usman juga menambahkan bahwa yang dimaksud dengan wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung sehingga memperoleh data yang diperlukan.<sup>54</sup>

Dalam penelitian ini metode wawancara yang dilakukan oleh penulis ialah menggunakan pola wawancara terstruktur. Disamping berhadapan langsung dengan narasumber, penulis juga menyiapkan panduan wawancara yang telah dirumuskan secara cermat agar wawancara berjalan lancar dan senantiasa fokus pada masalah penelitian.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang di gunakan dalam metodologi penelitian sosial. Metode dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya.<sup>55</sup>

#### **b) Sumber Data Sekunder**

Sumber sekunder adalah data yang lebih dahulu diperoleh dan dilaporkan oleh pihak lain diluar dari

---

<sup>54</sup> Ibid, 174.

<sup>55</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta, Rineka Cipta Cet Ke X (edisi revisi III), 2010), hlm. 231.

penyelidikan peneliti. Ini artinya dalam data sekunder tidak memiliki keterkaitan secara langsung dalam proses penghimpunannya seperti data yang diperoleh dari karya ilmiah orang lain dan data-data statistik maupun peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan yang turut serta memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

#### **D. Rencana Pembahasan**

Langkah pertama yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini ialah melakukan identifikasi permasalahan. Setiap penelitian senantiasa berawal dari adanya masalah penelitian. Masalah penelitian diidentifikasi dan kemudian dibatasi, dan kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan penelitian. Identifikasi tersebut dimaksudkan untuk mempertegas batasan-batasan permasalahan sehingga cakupan penelitian tidak terlalu melebar dari tujuannya. Identifikasi masalah dalam penelitian ini terdiri dari dua langkah, yakni menguraikan latar belakang masalah dan merusukan permasalahan.

Langkah kedua yang harus ditempuh dalam penelitian ini ialah menyusun landasan teori. Landasan teori merupakan tujuan secara teoritis mengenai fokus penelitian. Teori-teori yang dibicarakan dalam penelitian ini ialah teori tentang peranan sistem informatika dan pengelolaan data pada perguruan tinggi. Teori digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Setelah landasan teoritis dapat dipahami secara komprehensif, langkah yang dapat dilakukan peneliti ialah melakukan pengumpulan dan analisis data. Dalam mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan metode wawancara terhadap para informan yang berasal dari Lembaga Penjamin Mutu dan juga Pimpinan utama dalam Pusat Data pada perguruan tinggi guna memahami bagaimana cara kerja pengelolaan data pada perguruan tinggi. Hal ini juga dilakukan untuk mengetahui tantangan serta hambatan apa saja yang dialami oleh Perguruan tinggi dalam pengelolaan data. Disamping itu, diharapkan juga peranan pengelolaan pangkalan data mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan akreditasi program studi pada perguruan tinggi yang ada di Wilayah PTKIN.

Hasil dari penelitian lapangan kemudian dijabarkan secara mendetail untuk kemudian dianalisis dengan kajian teoritis yang relevan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pada institusi mana sajakah pengelolaan data perguruan tinggi berjalan secara optimal dan tidak. Disamping itu dalam bagian analisis data juga akan menguraikan implikasi pengelolaan data perguruan tinggi terhadap akreditasi program studi dapat dijadikan sebagai acuan maupun langkah alternatif bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam skala nasional dalam menghadapi fenomena distorsi teknologi informasi. Regulasi serta model kegiatan pengelolaan data pendidikan tinggi juga perlu untuk dibedah agar perguruan tinggi mampu

mengimbangi kekurangan yang ada dalam pelayanan maupun kualitas aktualisasi akademik maupun non akademik



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Hasil Penelitian Pengelolaan Pangkalan data Pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.**

Sebagai salah satu perguruan tinggi Islam terbesar di Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengemban amanat umat untuk menjadi salah satu perguruan tinggi unggulan. Dalam usianya yang ke 60, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta telah mengalami berbagai perubahan, baik kelembagaan maupun wilayah kajian. Salah satu perubahan kelembagaan penting yang mengembangkan peran lembaga pendidikan tinggi Islam ini adalah transformasi kelembagaan dari Institut agama Islam negeri (IAIN) menjadi universitas Islam negeri (UIN) pada tahun 2002. transformasi tersebut dipandang tidak hanya sebagai sebuah kemajuan signifikan, namun juga sebagai tantangan untuk meningkatkan infrastruktur, pengembangan sistem dan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat, baik pada level nasional maupun internasional. Dalam konteks inilah pengembangan uIn membutuhkan strategi yang lebih terstruktur dan terukur baik dari sisi pengembangan sistem dan struktur organisasi dan tata kelola sumber daya manusia yang lebih rasional, budaya dan etos kerja yang lebih

professional serta sistem tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan Universitas Islam terkemuka yang saat ini telah mendapatkan akreditasi nasional dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan predikat A. Hal tersebut ditunjang oleh banyaknya program studi didalamnya yang telah mendapatkan akreditasi A pula. Setidaknya 36-40 prodi pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah telah mendapat akreditasi A dari 73 Prodi baik di tingkat S1, S2, S3, maupun profesi. Dalam upaya peningkatan nilai akreditasi, Universitas menerapkan manajemen pengelolaan akademik secara baik. Hal ini diwujudkan salah satunya dengan melakukan penataan data dan informasi dalam perguruan tinggi. Rekaman data dan informasi harus dapat memberikan dapat dipertanggungjawabkan.

Program rekaman data mahasiswa dan aktivitas perkuliahan pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah diwujudkan dengan adanya *Academic Information System (AIS)*. *Academic Information System (AIS)* adalah sistem administrasi akademik yang dikembangkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam hal ini dilaksanakan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (Pustipanda) sebagai *leading sector*-nya. Sistem ini sudah meliputi alur pendaftaran mahasiswa baru, aktifitas perkuliahan, beasiswa, sampai dengan wisuda.

Dalam format laporannya AIS menggunakan fasilitas barcode sebagai alat validasi untuk hasil cetak yang dilakukan oleh semua stakeholder (mahasiswa, dosen, dan lain-lain). AIS dapat diakses di alamat <http://ais.uinjkt.ac.id>.

Dalam hal pengelolaan pangkalan data, rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah telah membentuk Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (Pustipanda) yang memiliki peran membantu pimpinan universitas dalam hal pengembangan, pemanfaatan, dan pelaksanaan penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pengelolaan pangkalan data universitas telah menjadi tugas utama dari Pustipanda Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang dibantu oleh beberapa unit kerja yang ada dibawah garis koordinasinya. Unit kerja bertanggung jawab memberikan data dan informasi kepada universitas dengan format yang sudah ditetapkan oleh universitas. Pengelolaan pangkalan data pada masing-masing unit kerja menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja. Keabsahan dan keakurasian data dan informasi yang diberikan kepada universitas merupakan tanggung jawab masing-masing unit kerja.

Pusat Teknologi, Informasi dan Pangkalan Data UIN Syarif Hidayatullah memiliki wewenang diantaranya :

- a. Melakukan pengembangan teknologi informatika dan komunikasi yang sejalan dengan kebijakan Universitas.
- b. Melakukan kegiatan pengelolaan akses teknologi, informasi dan komunikasi guna kepentingan seluruh civitas akademik UIN Syarif Hidayatullah.
- c. Melakukan pengaturan sistem pangkalan data dan manajemen informasi yang terintegrasi, sesuai dengan kepentingan universitas dan unit kerja didalamnya.
- d. Menjamin kelancaran akses internet dan intranet universitas.
- e. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan praktikum teknologi informasi dan komunikasi bagi stakeholder internal dan eksternal.
- f. Mengembangkan kerjasama teknologi informasi dan komunikasi dengan pihak lain untuk kemajuan universitas.
- g. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh universitas dan seluruh unit kerja sesuai format baku yang dikembangkan PUSTIPANDA
- h. Membantu universitas dalam hal pengadaan dan perawatan perangkat keras.
- i. Mengamankan aset universitas yang berupa perangkat keras, perangkat lunak, dan produk-produk

TIK yang dikembangkan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- j. Menangani penyalahgunaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan universitas dan menyerahkan penyelesaiannya kepada rektor.

Prinsip dalam pengelolaan data yang dijalankan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ialah :

1. Data merupakan aset yang memiliki nilai bagi UIN dan dikelola dengan benar (*Data is an Asset*).
2. Pengguna memiliki akses ke data yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka, sehingga data dibagi pada seluruh fungsi dan organisasi di UIN (*Data is Shared*).
3. Data dapat diakses bagi pengguna untuk menjalankan fungsi mereka (*Data is Accessible*).
4. Setiap elemen data bertanggung jawab atas kualitas data (*Data Trustee*).
5. Data didefinisikan secara konsisten di seluruh UIN, dan definisi tersebut dapat dimengerti dan tersedia untuk semua pengguna (*Data Common Vocabulary and Data Definitions*).

Kendala dalam Pengelolaan pangkalan data tidak begitu banyak dihadapi oleh tim Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah. Hal-hal yang berkaitan dengan perangkat sistem awalnya menjadi masalah yang sering dihadapi oleh tim Pustupanda, namun seiring dengan adanya respon baik dari pimpinan, tim Pustipanda telah mampu mengembangkan sistem baru dalam hal informasi akademik, sehingga UIN tidak perlu lagi bergantung pada provider luar dalam hal instalasi maupun perbaikan sistem.

## **2. Hasil Penelitian Pengelolaan Pangkalan Data pada UIN Sultan Maulana Hasanudin, Kota Serang, Banten**

Pada tanggal 3 April 2017 melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2017 dan diundangkan dalam Lembaran Negara pada tanggal 7 April 2017, IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten resmi menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, struktur organisasi Universitas meliputi: Organ Pengelola, Organ Pertimbangan, dan Organ Pengawasan. Organ Pengelola Universitas terdiri atas: (a) Rektor dan Wakil Rektor; (b) Fakultas; (c) Pascasarjana; (d) Biro; (e) Lembaga;

dan (f) Unit Pelaksana Teknis. Sementara Organ Pertimbangan terdiri dari: (a) Senat Universitas; (b) Dewan Penyantun; sedangkan Organ Pengawasan berbentuk Satuan Pengawasan Internal (SPI).

Saat ini UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten memiliki 5 (lima) Fakultas S1 dan Program Pascasarjana (S2). Kelima Fakultas tersebut adalah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin dan Adab, Fakultas Dakwah, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Selain institusi UIN SMH Banten, semua program studi jenjang Magister dan jenjang Sarjana sudah terakreditasi BAN-PT. UIN Sultan Maulana Hasanudin merupakan perguruan tinggi Islam yang terletak di Kota Serang Provinsi Banten. Dalam perkembangannya, Baru pendidikan Bahasa Arab saja yang mendapatkan Akreditasi A, namun untuk program studi yang B saat ini sedang dalam tahap percepatan akselerasi menuju akreditasi A.

Percepatan akselerasi dan pembenahan pengelolaan pangkalan data menjadi konsentrasi pokok yang dijalankan oleh Universitas disamping aktualisasi kegiatan akademik dan non akademik. Karena pada dasarnya jika aktualisasi penyelenggaraan pendidikan tinggi sudah dijalankan dengan baik namun dalam hal pelaporan data tidak sejalan dengan aktualisasi yang optimal tentunya akan berdampak pula pada nilai akreditasi pada universitas tersebut. Hal ini diperkuat

dengan gencarnya pola pandang pemerintah yang harus mampu selaras dengan program digitalisasi. Digitalisasi yang dimaksud ialah standar pelaporan aktualisasi perguruan tinggi harus senantiasa memiliki rekaman dan pengelolaan data secara baik yang dapat dilihat oleh siapapun dalam suatu sistem informasi.

Program rekaman data mahasiswa dan aktivitas perkuliahan pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dijalankan dengan SIAKAD, yakni Sistem Informasi Akademik dengan bantuan developer sistem dari Gamatechno.

Pengembangan pangkalan data pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin diselenggarakan oleh Pusat Teknologi dan Pangkalan Data (Pustekipad). Yang terdiri dari unit pusat kampus dan pengelola di tingkat jurusan.

Untuk program pangkalan data terpadu Ristekdikti merupakan program yang saat ini juga sedang dilakukan pembenahan pelaporan, hal ini dimaksudkan selain sebagai media transformasi penyelenggaraan pangkalan data namun juga dapat dijadikan base data guna kepentingan yang berkaitan dengan data seperti salah satunya akreditasi. Sinkronisasi data pada saat visitasi juga merupakan satu hal yang menjadi perhatian utama. Oleh karenanya maka dalam setiap visitasi Pustekipad juga menugaskan tim pusat untuk memberikan penjelasan terkait dengan pengelolaan data.



Kendala yang dihadapi oleh tim Pusat Teknologi dan Pangkalan Data (Pustekipad) UIN Sultan Maulana Hasanudin dalam pengelolaan pangkalan data salah satunya disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang ada pada Pusat Teknologi dan Pangkalan Data (Pustekipad). Sekalipun pada tiap program studi telah memiliki satu tenaga pengelola pangkalan data, namun seringkali tenaga pengelola tersebut disibukkan dengan kepentingan Program Studi lainnya. Sehingga progres dalam pelaporan seringkali ada yang terlambat dan adapula yang terlewat.

### **3. Hasil Penelitian Pengelolaan Pangkalan Data pada IAIN Purwokerto, Jawa Tengah**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto merupakan pengembangan dan alih status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Purwokerto menjadi IAIN Purwokerto. Secara historis, STAIN Purwokerto juga merupakan alih status dari Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1964-1994) dan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang (1994-1997) yang berkedudukan di Purwokerto. Seiring dengan alih status menjadi IAIN, terjadi penambahan 10 (sepuluh) program studi strata satu (S-1) baru berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 547 Tahun 2015 dan 4 program studi jenjang pascasarjana strata

dua (S-2). Sampai saat ini IAIN Purwokerto mengelola 22 prodi S-1, 6 prodi S-2, dan 1 prodi Diploma III

Prestasi dalam hal perolehan akreditasi program studi diwujudkan dengan adanya 9 dari 28 Program Studi S1 pada Institut Agama Islam Purwokerto telah mendapat akreditasi A oleh BAN-PT. Ini berarti sepertiga dari program studi yang ada telah mencapai optimalisasi aktualisasi prestasi akademik dan non akademik yang baik. Tentunya dalam proses dokumentasi dan informasi senantiasa menjadi faktor primer yang mampu menyumbangkan nilai positif dalam setiap perkembangan Program Studi.

Adapun yang menjadi aktivitas pengelolaan data pada Institut Agama Islam Purwokerto diantaranya ialah program sistem informasi akademik yang diakses melalui laman *Sisca.iainpurwokerto.ac.id* dengan bantuan provider *Easy counter* yang telah berjalan sejak tahun 2016 lalu. Disamping itu, pengelolaan data juga diselenggarakan dengan menggunakan web server Forlap PDDIKTI yang didalamnya memuat segenap aktivitas kuliah mahasiswa dan juga aktivitas tridharma perguruan tinggi yang dijalankan oleh dosen. Forlap Ristekdikti merupakan instrumen pelaporan data yang wajib dijalankan berdasarkan sistem pangkalan data Nasional. Kedudukan pelaporan data Forlap Ristekdikti telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan sehingga wajib bagi lembaga pangkalan data perguruan tinggi untuk

menyelenggarakan pengelolaan pangkalan data nasional tersebut dan melaporkannya di tiap Semester.

Keseluruhan kegiatan pangkalan data pada IAIN Purwokerto tersebut dipandu dan ditanggungjawabinya oleh Unit Teknologi, Informasi, dan Pangkalan Data IAIN Purwokerto (UTIPD Purwokerto). Guna memudahkan koordinasi dan penyelenggaraan pangkalan data secara terpadu maka pada tiap unit maupun prodi setidaknya memiliki satu admin yang menanggungjawabinya terpenuhinya kebutuhan data yang berasal dari Mahasiswa dan Dosen.

Kendala yang dihadapi oleh IAIN Purwokerto dalam menjalankan kegiatan pangkalan data berasal dari berbagai faktor. Diantaranya ialah masih kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh institusi dalam melakukan pelaporan data ke sistem nasional Forlap Ristekdikti, terlebih lagi apabila di tiap program studi mengharuskan satu orang admin yang fokus pada pengelolaan sistem informasi akademik dan forlap Pddikti. Disamping itu, pengawasan terhadap pelaporan data di tingkat jurusan juga masih sangat lemah dan cenderung pasif. Kebijakan terkait intensitas pelaporan belum ditentukan secara khusus, sehingga dalam prosesnya perubahan data dan pelaporan data kepada admin universitas hanya berjalan apabila ada pihak (baik dari mahasiswa maupun dosen) yang meminta pembaharuan data.

Mekanisme pelaporan data pada IAIN Purwokerto juga masih dalam tahap pelaporan berjenjang. Dimana admin

program studi membuat data pelaporan dalam bentuk file excel, kemudian diserahkan kepada tim pangkalan data pusat yang ada di universitas. Proses upload dari admin universitas kepada Forlap Ristekdikti biasanya memakan waktu 1 bulan sejak diterimanya file excel dari program studi. Dengan demikian, penulis melihat bahwa adanya interval dan proses yang cukup lama dalam melakukan pembaharuan data pada IAIN Purwokerto.

Meskipun pola pembaruan data yang ada pada IAIN Purwokerto dirasa masih cukup lama, narasumber dari tim pangkalan data IAIN Purwokerto menganggap bahwa dalam hal pelaporan data dan dampaknya terhadap program studi masih berjalan secara optimal. Hal ini tentunya dibarengi dengan konsistensi dan kerja keras admin universitas sebagai konduktor pelaporan dan pengelolaan data yang ada pada institusi. Rasa tanggungjawab tinggi dalam pengelolaan pangkalan data senantiasa ditujukan kepada operator pangkalan data universitas, sehingga agar dikemudian hari tidak memberikan dampak yang merugikan bagi dosen dan juga mahasiswa maka pembaharuan dan pengelolaan data harus optimal. Terlebih lagi jika data tersebut mampu menunjang tercapainya visi perguruan tinggi dalam mewujudkan insitusi yang menyelenggarakan pendidikan integratif dengan pemanfaatan Pusat Informasi dan Tekhnologi

#### **4. Hasil Penelitian Pengelolaan Pangkalan Data pada IAIN Pekalongan**

Pada tanggal 1 Agustus 2016, STAIN Pekalongan dikukuhkan perubahan statusnya menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016. Dengan demikian, lahirnya Fakultas Syariah Bumiayu sampai perkembangannya saat ini menjadi IAIN Pekalongan adalah dilatarbelakangi oleh semangat agar lembaga ini terus berkembang dan maju dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Pekalongan dan sekitarnya, karena itu ke depan IAIN Pekalongan diharapkan mampu berkembang menjadi UIN Pekalongan. Semangat ini tentu tidak terlepas dari kehidupan syiar agama Islam di Pekalongan.

Dalam hal pengelolaan pangkalan data, IAIN telah menentukan unit pengelola yang kemudian disebut sebagai Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (UTIPD). UTIPD mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan sistem teknologi informasi dan pangkalan data di lingkungan Institut yang diatur berdasarkan pasal 73 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016, tertanggal 9 November 2016 tentang ORTAKER IAIN Pekalongan.

Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (UTIPD) dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh Rektor, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan

Dalam tugas menjalankan sinkronisasi data SIKADU dan Forlapristekdikti, Pusat pangkalan Data IAIN Purwokerto membentuk Divisi Sistem Informasi dan Basis Data (Programming & Database) yang tugasnya ialah :

- Menghimpun dan mengolah data-data institusi di system yang dimiliki IAIN Pekalongan;
- Melakukan koordinasi dengan divisi lain di lingkungan Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (UTIPD) dalam pengembangan sistem informasi;
- Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain di lingkungan IAIN dalam pengembangan sistem informasi;
- Melakukan koordinasi langsung dengan Kepala Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (UTIPD) dalam melaksanakan tugas rutin;
- Melaporkan hasil kerja kepada Kepala Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (UTIPD) secara berkala dalam bentuk lisan maupun tulisan;
- Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengembangan sistem informasi.

Sampai dengan saat ini, Program studi yang mendapatkan akreditasi A pada IAIN Pekalongan berkisar 25% dari keseluruhan prodi di IAIN Pekalongan. Ini berarti 3 prodi dari 12 Prodi yang ada di IAIN Pekalongan. Prodi

tersebut ialah Ilmu Alqur'an dan Tafsir, Pendidikan Agama Islam, dan Pendidikan Bahasa Arab.

Dalam temuan peneliti, tidak ditemukan kendala yang berarti dalam hal pengelolaan pangkalan data. Pelaporan pada Forlap Ristekdikti dan juga pelaksanaan sistem informasi akademik telah berjalan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan pemerintah. Berkaitan dengan aspek akreditasi program studi, peneliti melihat faktor aktualisasi program studi menjadi faktor utama yang menyebabkan masih sedikitnya program studi yang mendapatkan akreditasi A.

## **5. Hasil Penelitian Pengelolaan Pangkalan Data pada UIN Walisongo Semarang**

Sejak sejak 19 Desember 2014 Institut Agama Islam Negeri Walisongo telah resmi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo bersamaan dengan dua UIN yang lain, yaitu UIN Palembang dan UIN Sumut. Peresmian dan penandatanganan prasasti dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka.[1] UIN Walisongo secara resmi berdiri pada tanggal 6 April 1970 melalui Keputusan Menteri Agama RI (KH. M. Dachlan) No. 30 dan 31 tahun 1970. Pada awal berdirinya, Perguruan Tinggi Agama Islam ini memiliki 5 fakultas yang tersebar di berbagai kota di Jawa Tengah, yakni Fakultas Dakwah di Semarang, Fakultas Syari'ah di Bumiayu, Fakultas Syari'ah di Demak, Fakultas Ushuluddin di Kudus dan Fakultas Tarbiyah di Salatiga. Namun, ide dan

upaya perintisannya telah dilakukan sejak tahun 1963, melalui pendirian fakultas-fakultas Agama Islam di beberapa daerah tersebut yang dilakukan secara sporadis oleh para ulama sebagai representasi pemimpin agama dan para birokrat santri.

UIN Walisongo Semarang memiliki visi Menjadi Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038, maka dalam misinya Institusi harus mampu Mewujudkan tata pengelolaan kelembagaan professional berstandar internasional.

Saat ini universitas Islam Negeri Walisongo telah mendapatkan akreditasi BAN-PT dengan predikat A. Hal ini tentunya tidak terlepas dari optimalnya aktualisasi penyelenggaraan perguruan tinggi yang ditunjang oleh unit-unit yang ada pada UIN Walisongo Semarang. Salah satu unit yang mempunyai peranan dalam peningkatan mutu perguruan tinggi UIN Walisongo ialah Pusat Teknologi, Informasi Dan Pangkalan Data.

Dalam menjalankan tugasnya, PTIPD UIN Walisongo telah mampu menciptakan sistem integrasi data perguruan tinggi yang terdiri dari SIAKAD dan juga SiJamu (jaminan mutu universitas). Dalam sistem informasi tersebut, UIN Walisongo telah mampu menjalankan sistem secara mandiri (tidak menggunakan provider luar). Peranan PTIPD dalam pengelolaan pangkalan data senantiasa ditunjang dengan kemampuan unit pangkalan data yang ada pada program studi.



Peranan pengelola pangkalan data pada program studi yakni melakukan proses input data yang berkenaan dengan aktivitas kuliah mahasiswa serta penyelenggaraan aspek tridharma perguruan tinggi oleh dosen homebase. Sedangkan pada unit pusat, melakukan perubahan serta penambahan informasi yang berkaitan dengan statuta pro., mgram studi dan data kurikulum.

Peran pengelola pangkalan data juga sangat penting dalam hal menyambut kegiatan akreditasi program studi. PTIPD menjalankan fungsinya dalam pembaruan, pengawasan serta evaluasi terhadap data yang berkenaan dengan standar mutu borang akreditasi. Hal ini dilakukan agar terjalannya integrasi bukti fisik dan data pelaporan guna memperoleh nilai maksimum di tiap standar mutu.

Pada saat ini, program studi yang telah mendapatkan akreditasi A oleh Ban PT sebanyak 21 Program Studi, kemudian terakreditasi B sebanyak 18 program studi, dan terakreditasi C sebanyak 4 Program Studi. Program studi yang terakreditasi C umumnya merupakan program studi baru yang baru berjalan 2-3 tahun. Disamping itu, beberapa program studi yang saat ini mendapatkan akreditasi B saat ini sedang dalam tahap re-akreditasi yang semuanya diharapkan mendapatkan akreditasi A kelak.

Perhatian PTIPD UIN Walisongo dalam akreditasi program studi senantiasa bertumpu pada pelaporan Forlap Ristektikti yang dapat memberikan pengaruh pada penilaian

Akreditasi. Hal ini dikarenakan asesor BAN-PT senantiasa melakukan pemeriksaan terhadap pelaporan ristekdikti dalam melihat aktualisasi standar mutu pada borang. Sehingga dalam perjalanannya PTIPD selalu memastikan bahwa prodi telah menjalankan pelaporan secara baik. Beban Kinerja Dosen dan Laporan Kinerja Dosen juga dilakukan program studi sehingga jika dikemudian hari data fisik telah terpenuhi maka program studi wajib melakukan penginputan data ke dalam sistem.

## **6. Hasil Penelitian Pengelolaan Pangkalan Data pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon**

IAIN Syekh Nurjati Cirebon merupakan Institusi penyelenggara pendidikan tinggi terbesar di kota Cirebon. Dalam perkembangannya IAIN Syekh Nurjati Cirebon telah mampu memperoleh akreditasi B dari BAN-PT dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. IAIN Cirebon juga telah mampu menghantarkan 5 prodinya mendapatkan Akreditasi BAN-PT dengan nilai A. sedangkan 18 Prodi lainnya telah mendapatkan nilai akreditasi B. akreditasi pada program studi yang ada pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon tersebut tentunya tidak terlepas dari peran aktualisasi program studi dan pengelolaan data yang baik.

Kegiatan pengelolaan pangkalan data pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon dilaksanakan oleh unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data. Peran utama dari PTIPD IAIN Syekh

Nurjati Cirebon ialah memberikan layanan sistem informasi, jaringan dan pangkalan data yang baik dengan melakukan inovasi secara terus menerus dan berkesinambungan untuk mewujudkan keunggulan

Guna memudahkan rekap pelaporan data pada aktualisasi program studi, Lembaga Penjamin Mutu IAIN Syekh Nurjati Cirebon juga telah menetapkan program E-sms, Sistem Informasi Akademik (Siakad), dan Forlap Ristekdikti berada pada kewenangan PTIPD IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## **B. Pembahasan**

### **1. Peranan Pangkalan Data Perguruan Tinggi terhadap Akreditasi Program Studi :**

#### **a. Sebagai Media Transformasi Informasi Aktualisasi Program Studi**

Dalam hal akreditasi tidak hanya teknik pelaporan pangkalan data saja yang harus baik, *main content* dalam pelaporan merupakan hal utama yang harus senantiasa diperhatikan oleh seluruh civitas akademika perguruan tinggi.

Bagi program studi pada universitas yang telah memiliki aktualisasi maksimal dalam setiap pembahasan borang juga harus memiliki format pelaporan yang detail dan sesuai. Akan menjadi suatu ironi pula apabila aktualisasi telah berjalan maksimal namun hal tersebut tidak terdokumentasikan secara baik dalam pelaporan yang dilakukan oleh pangkalan data. Tentunya hal ini akan

berdampak pada kurang maksimalnya penilaian asesor terhadap satuan standar yang tertuang pada borang akreditasi.

Pangkalan data yang ada pada Perguruan Tinggi memiliki peran sentral dalam manajemen data perguruan tinggi. Tidak hanya melakukan penghimpunan data semata, pengelola pangkalan data juga dibebani tanggung jawab untuk menyediakan sistem yang akan dijalankan sebagai media perekam data. Oleh karenanya, Perguruan Tinggi senantiasa mengupayakan sistem informasi akademik dengan jalan menggandeng *provider* dalam menyediakan sistem informasi. Bahkan dalam temuan peneliti, Pengelola pangkalan data juga mampu mengupayakan membuat sistem mandiri yang tidak tergantung pada provider luar kampus dalam hal menghadirkan program penghimpunan data akademik (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Walisongo Semarang).

Dengan adanya program yang penghimpunan data akademik dan rekaman aktualisasi program studi, maka kemajuan program studi senantiasa dapat di ukur dan di evaluasi berdasarkan gambaran base data dari sistem tersebut. Pengukuran dan evaluasi dapat diselenggarakan oleh pihak Program Studi, Fakultas dan juga Universitas. Hal ini juga tentunya dapat memberikan kemudahan bagi stakeholder dalam melakukan penyusunan borang akreditas program studi bahkan universitas sekalipun.

Kepentingan penghimpunan dan pengelolaan data penyelenggaraan program studi pada dasarnya tidak hanya

dibutuhkan oleh kepentingan internal perguruan tinggi semata. Jika suatu saat data tersebut dibutuhkan oleh pihak luar kampus, maka transformasi informasi tersebut dapat diselenggarakan secara mudah dan efektif dengan menampilkan link server yang ada.

#### **b. Media Gambaran Pemetaan Kondisi Standar Mutu Akreditasi Program Studi**

Setidaknya terdapat 7 standar mutu yang menjadi acuan bagi program studi dalam menjalankan proses akreditasi, standar tersebut ialah :<sup>56</sup>

- a. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaiannya
- b. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu
- c. Mahasiswa dan lulusan
- d. Sumber daya manusia
- e. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
- f. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- g. Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama

Korelasi antara akreditasi dan Pangkalan data perguruan tinggi terdapat pada adanya keharusan bagi program studi

---

<sup>56</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, *Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Depdikbud, 2012), hlm. 43.

untuk senantiasa memuat konten yang berkaitan dengan profil program studi, home base dosen, data mahasiswa yang memuat aktivitas perkuliahan, data kurikulum, serta penyelenggaraan aspek tridharma perguruan tinggi oleh dosen yang harus terekam secara baik pada Forlap Ristekdikti.

Setidaknya peneliti mencatat terdapat korelasi pengelolaan pangkalan data pada standar kesatu, kedua, keempat dan ketujuh. Standar-standar tersebut dapat diperiksa kebenaran dan kesuaiannya pada Forlap Ristekdikti. Hal ini juga mengungkapkan bahwa antara aktualisasi penyelenggaraan program studi harus memiliki kesesuaian dengan apa yang dilaporkan pada Forlap Ristekdikti.

Gambaran mengenai kondisi pelaporan pangkalan data pada Pelaporan Ristekdikti mampu menunjukkan kualitas penyelenggaraan program studi. Sehingga jika kemudian dirasa masih belum banyak data yang dilaporkan dan diperbaharui maka Ketua Prodi dapat dengan segera mengambil kebijakan agar aktivitas akademik oleh mahasiswa dan dosen senantiasa berjalan optimal dan maksimal.

Pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pendidikan baik di pendidikan formal maupun nonformal sangat dipengaruhi oleh tersedianya data yang lengkap, sah (*valid*), dapat dipercaya (*reliable*), relevan dan tepat waktu. Dalam rangka mencapai perencanaan dan pelaksanaan program yang baik

maka semua unit kerja yang menangani perencanaan pendidikan memerlukan data yang memadai.<sup>57</sup>

### **c. Alat Kontrol Pengelolaan Program Studi Guna Terpenuhinya Kebutuhan Isian Borang Akreditasi**

Data memiliki manfaat yang besar dalam menentukan program pembangunan pendidikan. Manfaat data secara garis besar dapat dikelompokkan dalam empat kategori, yakni a) dasar penyusunan rencana dan program, b) alat kontrol atau monitor pelaksanaan program, c) dasar penilaian atau evaluasi, dan d) pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan.<sup>58</sup>

Dengan memperhatikan kondisi data objektif pada program studi, dapat diketahui apakah penyelenggaraan kegiatan akademik telah berjalan optimal atau belum. Jika kemudian data sudah menunjukkan adanya aktivitas yang baik dalam 4 periode kebelakang, maka upaya yang dapat dilakukan oleh program studi ialah memastikan bahwa data tersebut telah tersampaikan pada form Pelaporan Dikti.

Salah satu contoh yang berkaitan dengan dasar penyusunan dan program ialah jika dalam dua periode kebelakang program studi menemukan bahwa angka peminat program studi tidak menunjukkan peningkatan, maka program

---

<sup>57</sup> Ibid, hlm 22.

<sup>58</sup> Budi Oetomo Dharma Sutedjo, *Perancangan dan Pembangunan Sistem Informasi*.(Yogyakarta, Penerbit Andi: 2002), hlm. 23.

studi dapat merumuskan langkah-langkah yang mampu mengangkat peminat program studi di periode ketiga dan seterusnya. Output dari perencanaan tersebut senantiasa bermuara pada kebijakan yang disetujui oleh pihak fakultas maupun universitas sebagai induk dari Program studi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, pengelola pangkalan data pada program studi memiliki peran penting dalam kemajuan program studi. Hal ini dikarenakan mudahnya koordinasi dengan ketua program studi guna mengisi kebutuhan data yang dirasa masih kurang untuk dilaporkan. Oleh karenanya sudah tepat bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang menjadi objek penelitian ini dalam menentukan dan menetapkan keberadaan pengelola pangkalan data pada program studi.

Hal diatas juga dapat mendukung proses akreditasi yang nantinya dialami oleh program studi, karena pengelola pangkalan data pada program studi dapat menampilkan gambaran data aktualisasi program studi baik dalam kinerja dosen, aktivitas mahasiswa, maupun pengembangan kurikulum dalam program studi. Penting pula bagi pengelola data pada program studi untuk senantiasa menyelaraskan keadaan data program studi terhadap aktualisasi komponen dalam program studi tersebut.



## **2. Optimalisasi Peran Pangkalan Data Perguruan Tinggi:**

### **a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan penelusuran yang penulis temukan di lapangan, terdapat beberapa kendala yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi Islam. Diantaranya berkaitan dengan kondisi sumber daya manusia dalam pengelolaan pangkalan Data.

Pada umumnya pembagian tugas pengelolaan pangkalan data telah diselenggarakan pada unit Pusat Teknologi dan Informasi Perguruan Tinggi dan unit mikro Program Studi. Pada tiap-tiap program studi setidaknya telah ada operator pangkalan data yang menjalankan proses input dan transformasi data sistem informasi akademik ke dalam Forlap Ristekdikti.

Intensitas pelaporan data perguruan tinggi merupakan satu hal yang diharapkan berjalan berkesinambungan dan konsisten. Dalam penelitian ini, penulis melihat bahwa pemahaman terkait pengelolaan data dan juga sistem informasi akademik merupakan hal utama yang harus diketahui oleh pengelola pangkalan data. Pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Walisongo Semarang, pemberdayaan alumni yang berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi senantiasa dilibatkan dalam pengelolaan pangkalan data. Keberadaan alumni dari Fakultas Sains dan Teknologi mampu memberikan dorongan terciptanya sistem

informasi dan integrator pelaporan data yang mudah dioperasionalisasikan.

### **b. Manajemen Pengelolaan Pangkalan Data**

Seiring dengan disrupsi era menuju era digitalisasi, perguruan tinggi memiliki keharusan untuk senantiasa mengembangkan aktualisasi internal maupun lingkungan eksternal dengan pendekatan teknologi. Pendekatan teknologi yang dimaksud ialah kualitas sumber daya manusia diharapkan mampu menguasai perkembangan modernisasi berbasis digital, dan aktualisasi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi terekam secara baik dan update terhadap kemajuan teknologi.

Perguruan tinggi yang maju tentunya harus menyadari bahwa pengelolaan data secara baik dan berkualitas sama halnya dengan mengelola aset berharga yang menjadi kunci utama dalam mewujudkan perguruan tinggi yang unggul dan kompetitif, sehingga manajemen data yang baik menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada perguruan tinggi.

Manajemen data merupakan aktivitas manajerial yang menggunakan teknologi sistem informasi dalam menjalankan peran pengelolaan dan penghimpunan data akademik dalam perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan informasi semua stakeholder yang berkepentingan.

Berdasarkan temuan lapangan yang penulis terima, manajemen pangkalan data yang dijalankan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam bermuara pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang salah satu ketentuannya memuat mengenai upaya mengintegrasikan data akademik pada perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dengan adanya ketentuan tersebut, dibutuhkan sistem informasi dan sistem pelaporan yang mampu menghimpun setiap perkembangan perguruan tinggi mulai dari identitas instansi sampai dengan aktualisasi kegiatan akademik. Hingga sampailah pada kondisi terkini dimana tiap-tiap perguruan tinggi menjalankan sistem informasi akademik dan juga sistem pelaporan pangkalan data.

Sistem informasi akademik yang dijalankan pada perguruan tinggi keagamaan Islam yang menjadi objek penelitian peneliti diselenggarakan sebagai instrumen penghimpunan data dan pengelolaan data yang berkaitan dengan aktivitas akademik perguruan tinggi. Disamping itu sistem informasi akademik ini juga memiliki peran sebagai media transformasi informasi aktivitas akademik manakala ada pihak-pihak yang berkepentingan (memiliki wewenang) membutuhkan gambaran detail terkait dengan aktivitas akademik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen.

Instrumen sistem akademik juga dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi assesor dari BAN-PT dalam

memberikan penilaian / skor pada standar Tata Pamong dan Manajemen Program Studi.

Dalam menjalankan sistem informasi akademik, peneliti melihat adanya sistem yang tidak terstandarisasi nasional. Maksudnya tiap-tiap perguruan tinggi diperkenankan menjalankan sebuah sistem informasi dengan bekerjasama dengan provider dari swasta. Salah satu contoh yang dari perguruan tinggi yang menjalankan sistem dengan bantuan swasta yang peneliti temukan dilapangan ialah UIN Sultan Maulana Hasanudin yang bekerjasama dengan Gamatechno Yogyakarta, dan juga IAIN Purwokerto yang bekerjasama dengan tim *Easy Counter* Purwokerto. Sedangkan pada beberapa perguruan tinggi lainnya telah mampu menciptakan sistem informasi akademik mandiri yang tidak melibatkan provider dari luar seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Walisongo Semarang, dan juga IAIN Cirebon.

Permasalahan yang berhubungan dengan pelaporan data PDDIKTI pada perguruan tinggi dalam pengamatan peneliti pada umumnya disebabkan oleh masih berjalannya pemrosesan data secara tradisional dari Sistem Informasi Akademik kepada *feeder* yang akan diteruskan pada Forlap PDDIKTI. Informasi yang ada pada Sistem Informasi Akademik yang ada masih harus ditransformasikan kedalam format excel sebelum dimasukkan pada feeder PDDIKTI. Permasalahan yang sering terjadi dari kegiatan yang demikian umumnya ialah adanya ketidaksesuaian data antara data

sistem informasi dan data pada feeder. Pada perguruan tinggi yang menggunakan provider dari luar institusi, template yang ada pada sistem informasi membutuhkan penyesuaian yang cukup lama agar sesuai dengan tampilan template *feeder* PDDIKTI. Hal demikian tentunya sering berakibat adanya data yang tidak tersalin, bahkan dalam beberapa kasus ditemukan adanya ketidaksesuaian. Pada umumnya data yang menjadi domain utama dalam pelaporan kepada

Instrumen lainnya yang berkaitan dengan aktivitas pangkalan data ialah pembaruan data Dosen yang ada pada Forlap Ristekdikti. Dalam optimalisasi kualitas pelaporan data profil dosen dan program studi, para pengelola pangkalan data harus senantiasa mampu melampirkan bukti penunjang yang berupa Surat Keputusan maupun surat keterangan lainnya. Karena pada standar demikian proses persetujuan perubahan data Dosen dilakukan oleh operator program Forlap Ristekdikti pusat. Sedangkan pada data mahasiswa dan kurikulum kesesuaian data pada data Forlap Ristekdikti harus senantiasa mengacu pada kondisi sistem informasi akademik yang digunakan.

Guna melakukan pemantauan pelaporan dan membaca progres pelaporan dalam perguruan tinggi, Lembaga Penjamin Mutu dalam perguruan tinggi menjadi unit memiliki kewenangan yang turut serta mengawal jalannya proses pengelolaan pangkalan data.

Berdasarkan temuan peneliti pada objek perguruan tinggi di wilayah pulau Jawa, peran Lembaga Penjamin Mutu telah mampu menjalankan peran pengawasan pengelolaan pangkalan data yang dilaksanakan oleh Pusat Teknologi dan Informasi Perguruan Tinggi. Hal ini dapat diketahui dengan semakin banyaknya Program Tinggi Keagamaan Islam di pulau Jawa yang saat ini telah mampu berakselerasi dalam mendapatkan predikat akreditasi A.

Peranan Lembaga Penjamin mutu juga telah mampu menjadi unit sentral yang mendukung dan memberikan masukan terhadap pimpinan universitas dalam pengembangan pengelolaan pangkalan data. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya kebijakan serta fasilitas pangkalan data yang dimotori oleh analisa dan pengamatan Lembaga Penjamin Mutu terhadap pengelolaan pangkalan Data.

Optimalisasi peran pangkalan data yang ada pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang menjadi objek penelitian ini menurut peneliti dapat difokuskan pada beberapa prinsip, diantaranya ialah : *Tangible*( bukti fisik), *Reability* (keandalan), *Responsiveness* (daya tanggap), dan *emphaty* (empati).<sup>59</sup>

Prinsip *Tangible*( bukti fisik) dalam pengelolaan pangkalan data memiliki makna bahwa setiap instrumen data yang diinput harus berasal dari bukti fisik yang benar-benar

---

<sup>59</sup> Budi Oetomo Dharma Sutedjo, *Perancangan dan Pembangunan Sistem Informasi*.(Yogyakarta, Penerbit Andi: 2002), hlm. 23.

ada. Kebenaran informasi merupakan prinsip utama yang harus dipegang teguh oleh perguruan tinggi agar senantiasa mampu berinovasi dan gigih dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh karenanya, dalam pelaporan data tridharma perguruan tinggi pada Forlap Ristekdikti, dosen senantiasa dituntut untuk menampilkan bukti fisik. Hal ini seharusnya tidak menjadi permasalahan yang berarti mengingat bahwa dosen pada perguruan tinggi senantiasa di program untuk melakukan Pelaporan Beban Kinerja Dosen (BKD).

Prinsip selanjutnya ialah *reability* (keandalan) yang bermakna bahwa perguruan tinggi memiliki fasilitas dan instrumen yang dapat dijadikan sebagai pegangan dalam proses pengelolaan pangkalan data. Fasilitas yang dimaksud dapat bersifat *hardware* maupun *software*. Fasilitas *hardware* dapat diaktualisasikan dalam bentuk adanya perangkat komputer maupun server serta jaringan internet yang memadai. Sedangkan fasilitas *software* dapat berupa program maupun aplikasi komputer yang menunjang kegiatan pengelolaan pangkalan data. Dalam pengamatan peneliti, seluruh perguruan tinggi yang menjadi objek penelitian ini telah menjalankan prinsip *reability* yang baik. Hal ini dibuktikan dengan telah berjalannya sistem informasi akademik yang juga menjadi instrumen pelayanan kebutuhan akademik mahasiswa dan dosen. Disamping itu, pemerintah juga telah menjalankan instrumen informasi perguruan tinggi

secara nasional melalui Forlap Dikti, sehingga siapapun mampu mengandalkan informasi tersebut sebagai modal untuk mendapatkan informasi histori akademik dari mahasiswa maupun dosen.

Adapun prinsip *responsibility* (daya tanggap) memiliki pengertian bahwa pengelolaan pangkalan data harus senantiasa melakukan pembaruan data pada periode-periode tertentu. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa kinerja dosen serta aktivitas dalam perguruan tinggi senantiasa bersifat dinamis mengikuti pada kebutuhan dan kemajuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, perguruan tinggi senantiasa menentukan standar pembaruan data dalam skala bulanan, semester, maupun tahunan.

### **c. Kebijakan Pengelolaan Pangkalan Data Pada Perguruan Tinggi**

Guna mendukung jalannya pengelolaan pangkalan data pada perguruan tinggi, maka perguruan tinggi senantiasa merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan optimalisasi peran pangkalan data. Diantara kebijakan tersebut ialah

1. Merencanakan dan menentukan sistem informasi akademik
2. Menentukan operator pangkalan data
3. Menentukan koordinasi antara unit dan juga pusat pangkalan data



4. Melakukan penyesuaian data Forlap Ristekdikti terhadap kondisi objektif prodi sebelum visitasi

Perencanaan sistem akademik pada perguruan tinggi merupakan hal krusial yang menentukan unsur-unsur utama lain dalam pengelolaan pangkalan data. Jika melihat pada objek penelitian ini, penulis menemukan bahwa dalam pengadaan sistem informasi akademik dapat dilaksanakan pada 2 model. Model pertama ialah menyerahkan *programming system* kepada pihak ketiga (dalam hal ini provider), dan model kedua ialah membuat program sendiri yang melibatkan komponen sumber daya manusia yang terdapat pada perguruan tinggi. Penerapan model pertama dalam penelitian ini dilakukan oleh IAIN Syekh Nurjati Cirebon, IAIN Pekalongan, dan juga UIN Sultan Maulana Hasanudin Serang.

Sedangkan model kedua dijalankan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Walisongo Semarang yang saat ini telah menciptakan program sendiri untuk sistem informasi akademiknya. Hal ini tentunya didukung oleh keinginan Universitas yang ingin memberdayakan para alumninya yang berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi. Model ini juga telah diterapkan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sejak tahun 2018 lalu.

Kebijakan untuk menciptakan program sistem informasi akademik tersendiri memiliki dampak yang lebih baik, mengingat jika pengelolaan data pada sistem akademik melibatkan provider maka dalam beberapa kasus perubahan

data tentunya perlu memanggil teknisi provider untuk penyesuaiannya. Disamping itu waktu penyesuaian oleh provider membutuhkan tempo yang lebih lama dibandingkan pada sistem yang mandiri.

Langkah selanjutnya ialah menentukan kebijakan terkait operator. Peneliti menemukan data umum dimana kualifikasi operator ditentukan berdasarkan skala. Skala yang dimaksud ialah ukuran program studi, fakultas dan juga skala universitas. Domain penginputan data program studi, histori aktivitas perkuliahan, aktivitas dosen dan kurikulum merupakan tugas pokok yang diemban oleh operator program studi. Sedangkan domain universitas ialah melakukan pengecekan dan validasi terhadap data yang telah diinput oleh program studi. Pola demikian dirasa oleh peneliti sebagai langkah optimal dalam teknis pengelolaan pangkalan data pada perguruan tinggi. Namun yang menjadi catatan ialah dalam hal kebijakan operator ini kurang memperhatikan aspek besar-kecilnya program studi yang dapat diukur dengan jumlah mahasiswa dan juga dosen. Sehingga bagi jurusan yang memiliki mahasiswa dan dosen lebih banyak proses pelaporan dan penginputan data akan berjalan cukup lama mengingat operator yang ditunjuk jumlahnya rata-rata tidak lebih dari 2 operator.

Jika dihubungkan pada akreditasi program studi maka kebijakan penentuan sistem dan operator telah mampu memberikan jaminan bahwa data aktualisasi program studi

telah sesuai dengan rekap data pelaporan yang ada pada Forlap Ristekdikti. Program studi tidak dapat melakukan rekayasa maupun modifikasi yang melenceng dari pelaporan data program studi yang biasanya dimuat pada standar manajemen tata pamong dan kurikulum.

Kebijakan lainnya yang dapat diperoleh dari objek penelitian ini ialah adanya ketentuan dari Lembaga Penjamin Mutu di tiap-tiap institusi untuk senantiasa melakukan simulasi akreditasi dan juga sinkronisasi data program studi. Sinkronisasi yang dimaksud ialah dengan membandingkan data yang tampil pada sistem informasi akademik dan juga sistem Forlap Ristekdikti. Hal ini dilakukan agar disaat akreditasi nanti, asessor memperoleh kepastian akan kondisi objektif program studi. Proses simulasi dan sinkronisasi ini senantiasa melibatkan pengelola pangkalan data yang ada pada perguruan tinggi tersebut yang umumnya bernama Pusat Teknologi, Informasi dan Pangkalan Data.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Peranan Pangkalan Data Perguruan Tinggi terhadap Akreditasi Program Studi ialah ; *pertama* sebagai media transformasi informasi Aktualisasi Program Studi, mengingat bahwa kepentingan penghimpunan dan pengelolaan data penyelenggaraan program studi pada dasarnya tidak hanya dibutuhkan oleh kepentingan internal perguruan tinggi semata. Peranan *kedua* dari pangkalan data perguruan tinggi ialah sebagai Media Pemetaan Kondisi Standar Mutu Akreditasi Program Studi. Dimana Korelasi antara akreditasi dan Pangkalan data perguruan tinggi terdapat pada adanya keharusan bagi program studi untuk senantiasa menuat konten yang berkaitan dengan profil program studi, home base dosen, data mahasiswa yang memuat aktivitas perkuliahan, data kurikulum, serta penyelenggaraan aspek tridharma perguruan tinggi oleh dosen yang harus terekam secara baik pada Forlap Ristekdikti. Peranan *ketiga* ialah sebagai alat kontrol aktualisasi program studi, karena berdasarkan hasil penelitian lapangan, pengelola pangkalan data pada program studi memiliki peran penting dalam kemajuan program studi. Hal ini dikarenakan mudahnya koordinasi dengan ketua program studi guna mengisi kebutuhan data yang dirasa masih kurang untuk dilaporkan. Oleh karenanya sudah tepat bagi Perguruan

Tinggi Keagamaan Islam yang menjadi objek penelitian ini menentukan dan menetapkan keberadaan pengelola pangkalan data pada tiap-tiap program studi.

Optimalisasi peran pengelolaan pangkalan data pada perguruan tinggi dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: *Pertama*, melakukan manajemen pengelolaan pangkalan data dengan baik. *Kedua*, penerapan kebijakan pengelolaan pangkalan data yang progresif.

## **B. Saran**

Intensitas pengelolaan data perguruan tinggi merupakan satu hal yang diharapkan berjalan berkesinambungan dan konsisten. Sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan pangkalan data diharapkan memiliki sistem memadai. Beberapa kelemahan yang peneliti temukan dalam penelitian ini ialah :

1. Dalam sistem pelaporan Forlap Dikti masih dilakukan dengan cara yang tradisional, yakni pengelola pangkalan data jurusan harus mengkonversi data sistem informasi akademik ke file excel atau xps terlebih dahulu sebelum melakukan input data pada feeder PDDIKTI. Hal ini rentan dengan adanya data error atau tidak sesuai karena adanya penyesuaian template terlebih dahulu.
2. Adanya data error mampu berdampak pada kesesuaian kondisi objektif program studi terhadap rekap data yang

ada pada Forlap Ristekdikti. Hal ini dikhawatirkan mampu menjadi temuan pada saat visitasi akreditasi program studi yang akhirnya berdampak pada tidak maksimalnya nilai standar mutu di beberapa bagian.

Berdasarkan kelemahan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya sistem terpadu yang mampu menjangkau integrasi sistem informasi akademik dan Forlap Ristekdikri. Sehingga tidak diperlukan lagi konversi data pada format tertentu yang rentan akan kesalahan.
2. Perlunya evaluasi rutin dari tiap-tiap unit dalam melakukan evaluasi transformasi data. Hal ini ditujukan agar kesalahan-kesalahan data dapat diminimalisir.
3. Diperlukannya jumlah operator pengelola pangkalan data pada program studi yang rasional. Karena dalam beberapa kasus terdapat program studi dengan kapasitas mahasiswa dan dosen cukup besar namun dalam pengelolaan pangkalan data dikerjakan oleh satu orang saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

- Abdul Malik Fajar, *Holistika Pemikiran Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo. Persada, 2005..
- Bidang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti, *Permenristekdikti No 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi*, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Pddikti) Ristekdikti.
- Budi Oetomo Dharma Sutedjo, *Perancangan dan Pembangunan Sistem Informasi*. Yogyakarta, Penerbit Andi: 2002.
- Buku Kajian, *Analisis Sistem Akreditasi Program Studi*, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011.
- Buku Petunjuk. *Aplikasi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, hlm, 3.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, *Buku KurikulumPerguruan Tinggi*, (Jakarta: Depdikbud, 2014),.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, *Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Depdikbud, 2012).
- Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 26. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009).
- Nur Aedi, *Pengolahan dan Analisis Data Hasil Penelitian*. (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010).

Taliziduhu Ndraha, Pengantar Teori Pengembangan sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999).

Tim Pengembang SPMI, *Peta Masalah dalam Akreditasi Program Studi Berdasarkan Hasil Penilaian Akreditasi*, (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016).

#### **Artikel, Jurnal, Penelitian :**

Benny Leonard Enrico Panggabean. *Integrasi Pangkalan Data Perguruan Tinggi Dengan Teknologi Web Service*, Tesis, Pascasarjana UNHAS, Makassar. 2013.

Sunarni, Bambang Setyadin, *Analisis Pelaksanaan Beban Kerja Dosen (BKD)*, Jurnal Manajemen Pendidikan Volume 25, Nomor 1, Maret 2016.

#### **Internet :**

M. Fawaz Hilmy, dkk, *Sistem Akreditasi Prodi Dan Sistem Akreditasi Institusi*, diakses dari website <https://www.academia.edu/> pada tanggal 23 Agustus 2018, pukul 21.30. WIB.

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1989 tentang Standar Pendidikan Nasional.